

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

**2.1    Gambaran Umum Daerah**

**2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi**

**1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah**

**1.1    Luas dan Batas Administrasi**

Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah mencapai 48.258 Km<sup>2</sup> memiliki batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau tepatnya dengan Provinsi Kalimantan Selatan; Sebelah Timur Berbatasan dengan Pulau Bali; Sebelah Selatan Berbatasan dengan perairan terbuka yaitu Samudra Indonesia; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayah Jawa Timur terdiri dari 90% wilayah daratan dan 10% wilayah Kepulauan termasuk Madura. Secara administratif berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2013 tentang Buku Induk Kode Wilayah, Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) yang mempunyai 664 Kecamatan dengan 783 Kelurahan dan 7.722 Des

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Kecamatan dan Desa pada masing – masing**  
**Kabupaten/Kota se Jawa Timur**

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa		
		Kelurahan	Desa	Jumlah
Kabupaten				
01. Pacitan	12	5	166	171
02. Ponorogo	21	26	281	307
03. Trenggalek	14	5	152	157
04. Tulungagung	19	14	257	271
05. Blitar	22	28	220	248
06. Kediri	26	1	343	344
07. Malang	33	12	378	390
08. Lumajang	21	7	198	205
09. Jember	31	22	226	248
10. Banyuwangi	24	28	189	217
11. Bondowoso	23	10	209	219
12. Situbondo	17	4	132	136
13. Probolinggo	24	5	325	330
14. Pasuruan	24	24	341	365
15. Sidoarjo	18	31	322	353
16. Mojokerto	18	5	299	304
17. Jombang	21	4	302	306
18. Nganjuk	20	20	264	284
19. Madiun	15	8	198	206
20. Magetan	18	28	207	235
21. Ngawi	19	4	213	217
22. Bojonegoro	28	11	419	430
23. Tuban	20	17	311	328
24. Lamongan	27	12	462	474
25. Gresik	18	26	330	356
26. Bangkalan	18	8	273	281

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa		
		Kelurahan	Desa	Jumlah
27. Sampang	14	6	180	186
28. Pamekasan	13	11	178	189
29. Sumenep	27	4	328	332
<b>Kota</b>				
30. Kediri	3	46	0	46
31. Blitar	3	21	0	21
32. Malang	5	57	0	57
33. Probolinggo	5	29	0	29
34. Pasuruan	4	34	0	34
35. Mojokerto	2	18	0	18
36. Madiun	3	27	0	27
37. Surabaya	31	160	0	160
38. Batu	3	5	19	24

Sumber: Permendagri Nomor 18 Tahun 2013

1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa (selain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta). Provinsi Jawa Timur secara astronomis terletak antara 111,0<sup>o</sup>-114,4<sup>o</sup> Bujur Timur dan 7,12<sup>o</sup>-8,48<sup>o</sup> Lintang Selatan. Jawa Timur dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Jatim daratan dan Kepulauan Madura.

Panjang bentangan Barat-Timur Provinsi Jawa Timur sekitar 400 kilometer dan lebar bentangan utara-selatan sekitar 200 kilometer. Jawa Timur memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 232 pulau, pulau tanpa nama sebanyak 55 sehingga total keseluruhan pulau kecil yang dimiliki Provinsi Jawa Timur sebanyak 287 pulau (Sumber : Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2004). Pulau Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, di sebelah timur Pulau Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah utara pulau Jawa, sedangkan bagian selatan meliputi pulau Nusa Barung, Sempu, Sekel dan Panehan.

Kondisi kawasan pada Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 4 aspek antara lain kondisi kawasan tertinggal, kondisi kawasan pesisir, kondisi kawasan pegunungan dan kondisi kawasan kepulauan.

a. Kawasan Tertinggal

Daerah Tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Penentuan daerah tertinggal menggunakan 6 (enam) kriteria dasar, yaitu: Perekonomian masyarakat, Sumberdaya manusia, Infrastruktur, Kemampuan keuangan lokal, Aksesibilitas, dan Karakteristik daerah.

Meskipun daerah tertinggal identik dengan kemiskinan, namun pada hakekatnya pembangunan daerah tertinggal berbeda dengan penanggulangan

kemiskinan. Hal utama yang membedakannya adalah pada upaya pembangunan, dimana pada pembangunan daerah tertinggal sebagai daerah yang lekat dengan permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik harus ada upaya terencana untuk mengubah wilayah tersebut menjadi daerah yang maju dengan kualitas hidup yang sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat lainnya.

Lima Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yaitu; Kab. Pamekasan (59 desa), Sampang (86 desa), Bangkalan (90 desa), Situbondo (17 desa) dan Bondowoso (62 desa) merupakan bagian dari 183 Kabupaten diidentifikasi mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan wilayah lainnya yang ditetapkan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 393/KEP/PEM/M-PDT/XII/2011 tentang Penetapan Desa Tertinggal di Daerah Tertinggal dan Daerah Tertinggal yang Telah Terentaskan, rata-rata mempunyai keterbatasan infrastruktur & komunikasi, rendahnya tingkat pendidikan&kesehatan, serta banyaknya sumberdaya belum dikelola optimal.

**b. Kawasan Pesisir**

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat, seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Pesisir bagian utara, selatan dan laut di wilayah Provinsi Jawa Timur mempunyai hamparan hutan mangrove, padang lamun dan ekosistem terumbu karang yang mengelilinginya yang harus dilestarikan. Ketiga ekosistem tersebut memiliki ciri, sifat dan karakter yang berbeda – beda akan tetapi saling terkait satu sama lainnya. Hubungan ketiga ekosistem tersebut adalah mutualistik yaitu di antaranya: mangrove menyediakan makanan/hara bagi padang lamun sedangkan padang lamun memecah/meredam gelombang dari lautan sehingga mangrove tumbuh dengan baik karena mangrove tidak tahan terhadap gelombang cukup besar.

Berdasarkan kondisi geografis, wilayah pesisir dan laut Jawa Timur ke arah daratan sebagian besar merupakan pegunungan dan perbukitan sehingga kemiringan wilayah pesisirnya relatif tinggi. Kemiringan rendah (datar) dijumpai pada sebagian kecil wilayah teluk dan lembah. Ke arah laut wilayah pesisir

tersusun oleh pasir, tanah padas, batu dan karang dengan kemiringan yang relatif tajam.

**c. Kawasan Pegunungan**

Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Holosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwartir yang dipengaruhi adanya gunung berapi dan salah satunya adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa yaitu Gunung Semeru. Jajaran pegunungan di Provinsi Jawa Timur tersebar mulai dari perbatasan di timur dengan adanya Gunung Lawu, Gunung Kelud, Gunung Welirang, Gunung Arjuno, Gunung Semeru, Gunung Lamongan, Gunung Bromo, Gunung Argopuro, Gunung Pendil, Gunung Suket, Gunung Ijen, Gunung Merapi, Gunung Raung.

**d. Kawasan Kepulauan**

Pulau-pulau kecil di Jawa Timur berada dalam wilayah administratif terdiri dari 445 buah pulau yang tersebar di Kabupaten Pacitan (31 pulau), Kabupaten Tulungagung (19 pulau), Kabupaten Blitar (28 pulau), Kabupaten Malang (100 pulau), Kabupaten Situbondo (5 pulau), Kabupaten Sumenep (121 pulau), Kabupaten Gresik (13 pulau), Kabupaten Sampang (1 pulau), Kabupaten Trenggalek (57 pulau), Kabupaten Sidoarjo (4 pulau), Kabupaten Banyuwangi (15 pulau), Kabupaten Jember (50 pulau), dan Kabupaten Probolinggo (1 pulau). Dari beberapa wilayah tersebut kawasan yang memiliki pulau terbanyak adalah Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan struktur fisik dan kondisi geografis, Jawa Timur dapat dikelompokkan sebagai berikut : (1) Bagian Utara dan Madura merupakan daerah yang relatif kurang subur yang berupa pantai, dataran rendah dan pegunungan; (2) Bagian Tengah merupakan daerah yang relatif subur; (3) Bagian Selatan-Barat merupakan pegunungan yang memiliki potensi tambang cukup besar; (4) Bagian Timur pegunungan dan perbukitan yang memiliki potensi perkebunan, hutan dan tambang.

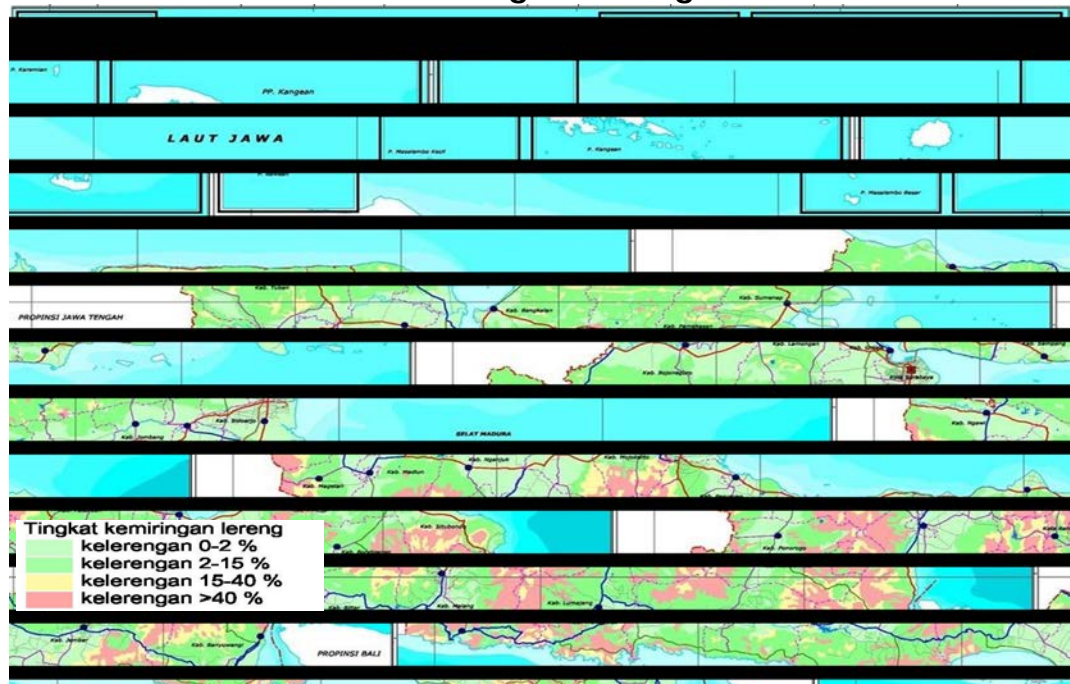
### **1.3 Topografi**

Kondisi topografi Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 2 aspek antara lain :

**a. Kemiringan Lereng**

Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai kemiringan lereng 0-15 % hampir di seluruh dataran rendah Provinsi Jawa Timur, sedangkan untuk kemiringan lereng 15-40% berada pada daerah perbukitan dan pegunungan, kemiringan lereng >40% berada pada daerah pegunungan.

**Gambar 2.1**  
**Peta Kemiringan Lereng**



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

**b. Ketinggian Lahan**

Secara topografi wilayah daratan Jawa Timur dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian, yaitu :

- Ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan laut: meliputi 41,39 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang.
- Ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut: meliputi 36,58 % dari luas wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung.
- Ketinggian 500 – 1000 meter dari permukaan laut: meliputi 9,49 % dari luas wilayah dengan kondisi berbukit.
- Ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut : meliputi 12,55 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi bergunung dan terjal.

**Gambar 2.2**  
**Peta Ketinggian Lahan**



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031



## **1.4 Geologi**

### **a. Struktur dan Karakteristik**

Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Holosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwartar yang dipengaruhi adanya gunung berapi. Sekitar 20,60 % luas wilayah yaitu wilayah puncak gunung api dan perbukitan gamping yang mempunyai sifat erusif, sehingga tidak baik untuk dibudidayakan sebagai lahan pertanian. Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai kemiringan tanah 0-15 %, sekitar 65,49 % dari luas wilayah yaitu dataran aluvial antar gunung api sampai delta sungai dan pesisir yang mempunyai tingkat kesuburan tinggi dan dataran aluvial di lajur Kendeng yang subur, dataran aluvial di daerah gamping lajur Rembang dan lajur Pegunungan Selatan cukup subur.

### **b. Potensi Kandungan**

Kondisi geologi Jawa Timur yang cukup kaya akan potensi sumberdaya mineral, memiliki sekitar 20 jenis bahan galian yang mendukung sektor industri maupun konstruksi, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat lajur, yaitu: pertama Lajur Rembang terbentuk oleh batu lempung napalan dan batu gamping merupakan cekungan tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi; kedua Lajur Kendeng terbentuk batu lempung dan batupasir, potensi lempung, bentonit, gamping; ketiga lajur Gunung Api Tengah terbentuk oleh endapan material gunung api kuartar, potensi bahan galian konstruksi berupa batu pecah, krakal, krikil, pasir, tuf; keempat lajur Pegunungan Selatan terbentuk oleh batu gamping dengan intrusi batuan beku dan aliran lava yang mengalami tekanan, potensi mineral logam, marmer, onyx, batu gamping, bentonit, pospat.

## **1.5 Hidrologi**

Sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Timur di aliri sungai, dua daerah aliran sungai terpenting di Jawa Timur yaitu DAS Brantas dan DAS Bengawan Solo. DAS Brantas merupakan sebuah sungai terbesar di Jawa Timur dengan panjang ± 320 km yang mengalir secara melingkar dan di tengah-tengahnya terdapat gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung Kelud. Sungai Brantas yang bersumber pada lereng Gunung Arjuno, mula-mula mengalir ke arah timur melalui kota Malang, lalu membelok ke arah selatan. Di kota Kepanjen Kali Brantas membelok ke arah barat dan di sini Kali Lesti yang bersumber di Gunung Semeru bersatu dengan Kali Brantas. Setelah bersatu dengan Kali Ngrowo di daerah Tulungagung, Kali Brantas berbelok ke utara melalui kota Kediri. Di kota Kertosono, Kali Brantas bertemu

dengan Kali Widas, kemudian ke Timur mengalir ke kota Mojokerto. Di kota ini Kali Brantas bercabang dua, ke arah kota Surabaya dan ke kota Porong yang selanjutnya bermuara di selat Madura.

Secara hidrologi wilayah Provinsi Jawa Timur terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi Wilayah Sungai (WS), dan Waduk, sedangkan air tanah berupa mata air. Pembagian WS di meliputi tujuh WS yaitu WS Bengawan Solo, WS Brantas, WS Welang – Rejoso, WS Pekalen – Sampean, WS Baru – Bajulmati, WS Bondoyudo – Bedadung, dan WS Madura.

**Tabel 2.2**  
**Luas Catchment Area (Km<sup>2</sup>) pada Wilayah Sungai**  
**di Provinsi Jawa Timur**

No	Wilayah Sungai	2009	2010	2011	2012	2013
1	Bengawan Solo	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00
2	Brantas	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00
3	Welang – Rejoso	2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00
4	Pekalen – Sampean	3.953,00	3.953,00	3.953,00	3.953,00	3.953,00
5	Baru – Bajulmati	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
6	Bondoyudo – Bedadung	5.364,00	5.364,00	5.364,00	5.364,00	5.364,00
7	Madura	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00

Sumber : Pengairan dalam angka dari tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Provinsi Jawa Timur memiliki 686 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tercakup dalam wilayah sungai, WS Bengawan Solo memiliki 94 DAS, WS Brantas memiliki 220 DAS, WS Welang – Rejoso memiliki 36 DAS, WS Pekalen – Sampean memiliki 56 DAS, WS Baru – Bajulmati memiliki 60 DAS, WS Bondoyudo – Bedadung memiliki 47 DAS, dan WS Madura memiliki 173 DAS.

Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah mata air yang cukup banyak dan tersebar di seluruh Wilayah sungai. Berdasarkan data Pengairan dalam angka dari tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 jumlah mata air yang ada masih tetap tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 4.389 mata air, yang memiliki debit rerata tahunan yang sama yaitu 73,20 m<sup>3</sup>/detik, serta memiliki volume tahunan 2.308,57 m<sup>3</sup>.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Mata Air, Debit Rerata Tahunan dan Volume Tahunan**  
**di Wilayah Sungai UPT PSDAW di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012**

No	Wilayah Sungai UPT PSAWS Kabupaten/Kota	Jumlah Mata Air (bh)	Debit Rerata Tahunan (m <sup>3</sup> /detik)	Volume Tahunan (10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup> )
<b>I</b>	<b>BENGAWAN SOLO</b>			
	<b>Madiun</b>			
1	Kabupaten Madiun	114	0,60	18,89
2	Kabupaten Magetan	138	3,12	98,46
3	Kabupaten Ngawi	217	2,68	84,55
4	Kabupaten Ponorogo	428	1,51	47,56
5	Kabupaten Pacitan	140	0,31	9,81
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.037</b>	<b>8,22</b>	<b>259,26</b>

No	Wilayah Sungai UPT PSAWS Kabupaten/Kota	Jumlah Mata Air (bh)	Debit Rerata Tahunan (m <sup>3</sup> /detik)	Volume Tahunan (10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup> )
	<b>Bengawan Solo</b>			
6	Kabupaten Bojonegoro	46	0,41	12,93
7	Kabupaten Gresik	11	0,57	17,98
8	Kabupaten Tuban	28	0,32	10,06
9	Kabupaten Lamongan	50	0,25	7,88
	<b>JUMLAH</b>	<b>135</b>	<b>1,55</b>	<b>48,85</b>
<b>II</b>	<b>BRANTAS</b>			
	<b>Bango Gedangan</b>			
10	Kab/Kota Malangdan Kota Batu	487	9,80	309,18
11	Kab/Kota Blitar	162	4,45	140,18
12	Kabupaten Tulungagung	76	0,96	30,21
13	Kabupaten Trenggalek	321	0,01	0,19
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.046</b>	<b>15,21</b>	<b>479,76</b>
	<b>Puncu Selodono</b>			
14	Kabupaten Kediri	323	8,27	260,71
15	Kabupaten Nganjuk	112	1,49	47,11
16	Kabupaten Jombang	73	0,98	30,84
	<b>JUMLAH</b>	<b>508</b>	<b>10,74</b>	<b>338,67</b>
	<b>Buntung Paketingan</b>			
17	Kabupaten Sidoarjo	5	0,01	0,16
18	Kabupaten Mojokerto	38	1,98	62,44
19	Kota Surabaya	0	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>43</b>	<b>1,99</b>	<b>62,60</b>
<b>III.</b>	<b>WELANG – REJOSO</b>			
	<b>Gembong Pekalen</b>			
20	Kabupaten Pasuruan	292	0,00	0,00
21	Kabupaten Probolinggo	222	6,44	203,09
	<b>JUMLAH</b>	<b>514</b>	<b>6,44</b>	<b>203,09</b>
<b>IV.</b>	<b>PEKALEN – SAMPEAN</b>			
	<b>Sampean Baru</b>			
22	Kabupaten Situbondo	57	3,38	106,56
23	Kabupaten Bondowoso	119	2,24	70,58
	<b>JUMLAH</b>	<b>176</b>	<b>5,62</b>	<b>177</b>
<b>V.</b>	<b>BARU – BAJULMATI</b>			
	<b>Sampean Baru</b>			
24	Kabupaten Banyuwangi	232	11,25	354,78
	<b>JUMLAH</b>	<b>232</b>	<b>11,25</b>	<b>354,78</b>
<b>VI.</b>	<b>BONDOYUDO – BEDADUNG</b>			
	<b>Bondoyudo – Mayang</b>			
25	Kabupaten Lumajang	255	2,15	67,80
26	Kabupaten Jember	315	1,50	47,30
	<b>JUMLAH</b>	<b>570</b>	<b>3,65</b>	<b>115,11</b>
<b>VII.</b>	<b>MADURA</b>			
	<b>Madura</b>			
27	Kabupaten Bangkalan	36	4,20	132,40
28	Kabupaten Sampang	33	1,04	32,86
29	Kabupaten Pamekasan	38	1,70	53,69
30	Kabupaten Sumenep	21	1,60	50,38
	<b>JUMLAH</b>	<b>128</b>	<b>8,54</b>	<b>269,33</b>
	<b>Total Jawa Timur</b>	<b>4.389</b>	<b>73,20</b>	<b>2.308,57</b>

Sumber :Pengairan dalam angka dari tahun 2008, 2009, 2011, 2012

1.6 Klimatologi

Keadaan iklim di Provinsi Jawa Timur secara umum termasuk iklim tropis yang mengenal 2 (dua) perubahan putaran musim, yaitu musim Kemarau (Mei-Oktober) dan musim Penghujan (Nopember-sampai sekitar bulan April). Curah hujan rata-rata antara 1.500 mm/tahun - 2.700 mm/tahun Hingga bulan Desember



seluruh wilayah di Jawa Timur sudah memasuki musim penghujan. Hampir setiap hari hujan mengguyur semua wilayah dengan intensitas ringan hingga lebat. Suhu rata-rata kisaran minimum 15,2 derajat celcius dan maksimal 34,2 derajat celcius. Berdasarkan sistem klasifikasi Schmidt dan Ferguson sebagian besar wilayah (52%) mempunyai iklim tipe D. Kelembaban udara berkisar 40% hingga 97%.

Jika ditinjau dari kondisi suhu udara, pada tahun 2013 di Provinsi Jawa Timur suhu udara maksimum mencapai 35,8 derajat Celcius (bulan Oktober) dan suhu udara minimum 20,6 derajat Celcius (bulan Juli dan Agustus). Jumlah curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Maret sebesar 461,1 mm. Rata-rata penyinaran matahari terlama di bulan Agustus dan terendah di bulan Nopember. Sedangkan kecepatan angin tertinggi di bulan Desember mencapai 28 knots dan terendah di bulan April mencapai 14 knots.

Tabel 2.4

Keadaan Cuaca Bulanan Tahun 2013

Bulan	Temperatur - Max (°C)	Temperatur - Min (°C)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Kecepatan Angin Maks
Januari	33,85	23,5	364,9	22,0
Februari	34,0	23,6	287,0	20,0
Maret	34,1	23,4	461,1	20,0
April	33,2	24,2	140,8	14,0
Mei	33,2	23,8	195,8	15,0
Juni	32,0	21,5	239,5	20,0
Juli	32,4	20,6	109,2	20,0
Agustus	33,1	20,6	0,6	18,0
September	33,7	21,6	0,2	20,0
Oktober	35,8	22,5	3,6	15,0
November	35,4	22,2	108,0	19,0
Desember	33,9	23,6	359,3	28,0

Sumber : Stasiun Meteorologi Klas I Juanda, Surabaya tahun 2013

1.7 Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan di Provinsi Jawa Timur dapat dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu :

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung memiliki luas kurang lebih 578.374 Ha atau sekitar 12,10% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk di dalamnya kawasan lindung mutlak di mana terdapat cagar alam seluas kurang lebih 10.958 Ha, suaka margasatwa seluas kurang lebih 18.009 Ha, taman nasional seluas kurang lebih 176.696 Ha, taman hutan raya seluas kurang lebih 27.868,3 Ha serta taman wisata alam seluas ± 298 Ha (SK Menteri Kehutanan Nomor 395/Menhut-II/2011)

**b. Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. penggunaan lahan budidaya adalah seluas kurang lebih 4.201.403,70 Ha atau 87,90% dari luas wilayah provinsi Jawa Timur. Gambaran perubahan proporsi penggunaan lahan di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan menurunnya luas wilayah pertanian. Pertanian lahan basah memiliki luas kurang lebih 911.863 Ha atau 19,08% dari luas wilayah provinsi Jawa Timur. Penggunaan lahan kawasan terbangun dikendalikan agar tidak mengkonversi luas pertanian lahan basah, terutama sawah irigasi teknis.

**Tabel 2.5**  
**Penggunaan Lahan Eksisting**  
**Provinsi Jawa Timur**

No.	Penggunaan Lahan	Eksisting (Ha)	Prosentase (%)
<b>A.</b>	<b>KAWASAN LINDUNG</b>	<b>578.571,30</b>	<b>12,11</b>
1	Hutan Lindung	344.742,00	7,21
2	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam	233.829,30	4,90
	1) Suaka Margasatwa	18.009,00	0,38
	2) Cagar Alam	10.958,00	0,23
	3) Taman Nasional	176.696,00	3,70
	4) Taman Hutan Raya	27.868,30	0,58
	5) Taman Wisata Alam	298,00	0,01
<b>B.</b>	<b>KAWASAN BUDIDAYA</b>	<b>4.201.403,70</b>	<b>87,89</b>
1	Kawasan Hutan Produksi	782.772,00	16,38
2	Kawasan Hutan Rakyat	361.570,30	7,56
3	Kawasan Pertanian	2.020.490,71	42,27
	1) Pertanian Lahan Basah	911.863,00	19,08
	2) Pertanian lahan kering/ tegalan/kebun campur	1.108.627,71	23,19
4	Kawasan Perkebunan	359.481,00	7,52
5	Kawasan Industri	7.403,80	0,15
6	Kawasan Pemukiman	595.255,00	12,45
7	Lainnya	74.430,89	1,56
<b>TOTAL</b>		<b>4.779.975,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

**2. Potensi Pengembangan Wilayah**

**2.1 Potensi Pertanian**

Potensi Pertanian Berdasarkan Perda Jawa Timur No 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Luas eksisting kawasan pertanian sebesar 2.020.491,71 ha dengan rincian pertanian lahan basah sebesar 911.863 ha dan pertanian lahan kering/tegalan/kebun campur sebesar 1.108.627,71 ha.

Rencana penggunaan lahan untuk pertanian lahan basah berupa Sawah beririgasi teknis dengan luas sekurang-kurangnya 957.239 Ha atau 20,03% dari luas Jawa Timur dengan peningkatan jaringan irigasi semi teknis dan sederhana menjadi

irigasi teknis yang tersebar di masing-masing wilayah sungai.

Rencana pengembangan pertanian lahan kering di wilayah Provinsi Jawa Timur ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 849.033 Ha atau 17,76% dari luas Jawa Timur yang diarahkan pada daerah-daerah yang belum terlayani oleh jaringan irigasi.

Untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional dan kebutuhan pangan Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan. Berdasarkan hal tersebut provinsi Jawa Timur menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Jawa Timur Seluas kurang lebih 1.017.549,72 Ha dengan rincian lahan basah seluas 802.357,9 Ha dan lahan kering seluas 215,191.83 Ha

## **2.2 Potensi Perikanan**

Potensi Perikanan Provinsi Jawa Timur pada dasarnya adalah pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengelolaan serta pemasaran hasil perikanan yang dikemas dalam sebuah sistem minapolitan. Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Jawa Timur memiliki prospek yang bagus, didukung oleh pengembangan pelabuhan perikanan Brondong yang terletak di Pantai Utara Jawa Timur, pengembangan pelabuhan perikanan Muncar di Kabupaten Banyuwangi, dan Prigi di Kabupaten Trenggalek.

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya terdiri dari perikanan budidaya air payau, perikanan budidaya air tawar, dan perikanan budidaya air laut. Sektor perikanan budidaya air payau berada pada kawasan Ujung Pangkah dan Panceng di Kabupaten Gresik, serta Sedati di Kabupaten Sidoarjo dengan komoditas ikan bandeng dan garam. Sedangkan potensi garam yang merupakan salah satu potensi budidaya air payau berada pada Kabupaten Bangkalan, Gresik, Lamongan, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sumenep, Tuban, serta Kota Pasuruan, dan Surabaya.

Perikanan budidaya air tawar berada pada Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Magetan, Malang, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Jember, dan Banyuwangi. Perikanan budidaya air laut tersebar pada wilayah pesisir seperti adanya sentra pengembangan ikan laut di bagian pantai utara Jawa Timur.

## **2.3 Potensi Pertambangan**

Potensi Pertambangan di Jawa Timur dibagi menjadi potensi pertambangan mineral (logam, bukan logam, batuan dan batubara), potensi pertambangan minyak dan gas bumi dan potensi panas bumi.

**a. Potensi Pertambangan Mineral**

Potensi pertambangan mineral logam di wilayah Provinsi Jawa Timur berada di wilayah: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung. Adapun potensi pertambangan mineral logam yang ada di Jawa Timur, diantaranya adalah Pasir Besi, Emas dan Mineral Pengikutnya, dan Mangan. Beberapa di antaranya sudah teridentifikasi, seperti di Kabupaten Pacitan diketahui terdapat potensi Pasir Besi sebesar kurang lebih 24.948.189 ton yang berada di Kecamatan Ngadirejo

Potensi pertambangan mineral bukan logam tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Jawa Timur. Potensi pertambangan mineral bukan logam yang sejauh ini dianggap potensial meliputi: Bentonite, Phiropilit, Feldspar, Zeolit, Feldspar, Kaolin, Phiropilit, Toseki, Pasir/Sirtu, dan Pasir Kwarsa yang tersebar di berbagai kabupaten di Jawa Timur. Sementara itu, potensi pertambangan batuan tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Jawa Timur, terutama pada wilayah sekitar gunung api, yaitu diantaranya batuan gamping, andesit, trass, marmer, tanah liat, tanah urug, opal, kalsedon, diorit, pasir, sirtu, onyx, toseki, breksi, jasper dan tuff. Sedangkan untuk potensi Potensi batubara di Jawa Timur tersebar di tiga kabupaten yaitu Trenggalek, Pacitan dan Tulungagung.

**b. Potensi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi**

Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang memiliki potensi pertambangan migas yang cukup potensial, dimana cadangan migas yang telah terbukti maupun yang masih terduga masih sangat besar. Jawa Timur menduduki posisi peringkat ke-3 (tiga) sebagai daerah penghasil pertambangan migas setelah Riau dan Kalimantan Timur yang tersebar di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, dan Kota Surabaya. Di wilayah Jawa Timur terdapat 39 blok migas, yang berstatus Produksi sebanyak 13 (tiga belas) Wilayah Kerja, status eksplorasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) Wilayah Kerja dan status development sebanyak 3 (tiga) Wilayah Kerja. Sedangkan potensi panas bumi di wilayah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Potensi Panas Bumi di Provinsi Jawa Timur**

No.	LAPANGAN	POTENSI (MWe)	KABUPATEN / KOTA	KETERANGAN
1	Gunung Lawu	195	Kab. Karanganyar, Sragen, Wonogiri (Prov. Jawa Tengah),	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP)

No.	LAPANGAN	POTENSI (MWe)	KABUPATEN / KOTA	KETERANGAN
			Kab. Ngawi, Magetan (Prov. Jawa Timur) kewenangan Pusat	2518 K/30/MEM/2014 13 Agustus 2012 Lelang oleh Pemerintah Pusat
2	Arjosari	18,5	Kab. Pacitan	Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas ESDM Jatim
3	Mlati	13,5	Kab. Pacitan	Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas ESDM Jatim
4	Ngebel - Wilis	165	Kab. Ponorogo dan Kab. Madiun	Eksplorasi Ijin Usah Pertambangan (IUP) 188/63/KPTS/119.3/2011 16 Juni 2011 PT. Medco Cahaya Geothermal
5	Gunung Wilis	50	Kab. Ponorogo, Kab. Madiun, Kab. Nganjuk, Kab. Kediri, Kab. Tulungagung dan Kab. Trenggalek	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2775 K/30/MEM/2014 3 Juni 2014
6	Gunung Pandan	60	Kab. Madiun dan Kab. Bojonegoro	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2774 K/30/MEM/2014 3 Juni 2014
7	Songgoriti	35	Kota Batu dan Kab. Malang	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2776 K/30/MEM/2014 3 Juni 2014
8	Arjuno - Welirang	185	Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan dan Kab. Malang	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2773K/30/MEM/2014 3 Juni 2014
9	Bromo - Tengger	-	Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Malang dan Kota Malang	Penugasan Survey Pendahuluan (PSP) 2903 K/30/MEM/2013 30 Juli 2013 PT. Hitay Renewable Energy
10	Krucil-Tiris	147	Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang	Penugasan Survey Pendahuluan (PSP) PT. Hitay Rawas Energy
11	Iyang - Argopuro	295	Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang	Eksplorasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) 1521K/034/M.PE/1990 30 Oktober 1990 PT. Pertamina Geothermal Energy
12	Gunung Raung	-	Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi	Pelaksanaan Survey Pendahuluan Panasbumi (PSP) PT. Hitay Runcing Energy
13	Blawan - Ijen	110	Kab. Bondowoso, Kab. Banyuwangi dan Kab. Situbondo	Eksplorasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) 188/62/KPTS/119.3/2011 25 Mei 2011 PT. Bakrie Dharmakarya

No.	LAPANGAN	POTENSI (MWe)	KABUPATEN / KOTA	KETERANGAN
				Energy
14	Pulau Bawean	14,5	Kabupaten Gresik	Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas ESDM Jatim
	Gunung Kelud	Potensi yang belum teridentifikasi	Kabupaten Blitar dan Kediri	Terdapat Sumber air panas yang diduga berasal dari kawah Gunung Kelud
	Parengan – Kec. Rengel	Potensi yang belum teridentifikasi	Kabupaten Tuban	Terdapat sumber air panas :: 1. Dsn. Nganget Ds. Kedungjambe Kec. Singgahan <b>T = 46,6 °C</b> pH = 6,9 2. Dsn. Prataan Ds. Wukiharjo Kec. Parengan <b>T = 43,8 °C</b> pH = 6,99

Sumber : Dinas ESDM Prov Jatim, 2014

## 2.4 Potensi Industri

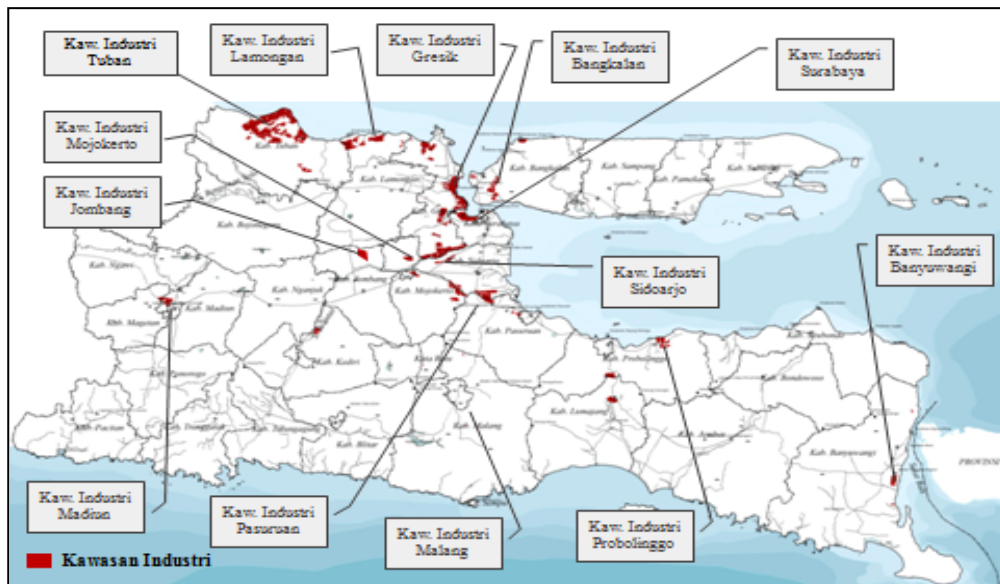
Kawasan peruntukan industri di Provinsi Jawa Timur meliputi: Kawasan industri, Kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri, dan sentra industri. Untuk mendorong pertumbuhan wilayah Provinsi Jawa Timur, maka pada dasarnya setiap daerah akan dikembangkan kawasan industri. Area industrialisasi di Jawa Timur masih terbuka bagi investor, kondisi tersebut dapat ditunjukkan adanya kawasan industri yang berkembang di wilayah pantura dan wilayah selatan Jawa Timur. Sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan adalah industri perikanan, industri manufaktur, industri pertambangan.

Potensi pengembangan kawasan industri baru di Jawa Timur sangat besar terutama di wilayah pantura serta sekitar Surabaya. Meskipun demikian beberapa wilayah lain juga potensial untuk mengembangkan kawasan industri terutama wilayah yang memiliki aksesibilitas laut dan udara besar. Berbagai industri pengolah hasil alam lebih cenderung kewilayah utara Jawa Timur, diantaranya pengembangan kawasan industri Tuban, diarahkan pengembangan diwilayah utara dan selatan sebagai pengembangan industri semen, dan petrochemical dengan ditunjang oleh adanya pelabuhan, pengembangan kawasan industri Lamongan, diarahkan pengembangan di wilayah utara sebagai pengembangan industri manufaktur, pengalengan ikan, kawasan penunjang kegiatan dilepas pantai (Shorebase), pengembangan kawasan industri Banyuwangi, diarahkan pengembangan diwilayah timur selatan, sebagai pengembangan industri perikanan, pengembangan kawasan industri wilayah selatan, diarahkan di wilayah Kabupaten Jember tepatnya di Puger dan diwilayah Kabupaten Trenggalek tepatnya di Prigi sebagai pengembangan kawasan industri perikanan, pengembangan kawasan industri Madiun, diarahkan sebagai pengembangan industri perkeretaapian dengan melibatkan masyarakat



pengrajin, pergudangan, pengembangan kawasan industri Bangkalan, diarahkan sebagai kawasan industri pengolahan, pergudangan.

**Gambar 2.3**  
**Peta Persebaran Kawasan Industri di Jawa Timur**



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Pengembangan kawasan industri di Jawa Timur didasarkan pada kecenderungan perkembangan lokasi kawasan industri di Jawa Timur saat ini dan potensi kawasan. Pengembangan kawasan industri skala besar yang berdampak penting terhadap perkembangan wilayah dalam arti berhubungan dengan pangsa pasar ekspor saat ini dikonsentrasikan di sekitar pantai utara Jawa, mulai dari Surabaya, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo pada kawasan gerbangkertosusila. Industri kimia dasar berdampak penting terhadap pembangunan dan perkembangan wilayah, seperti industri semen, farmasi, bahan makanan, serta petro kimia dapat dikonsentrasikan di wilayah Surabaya, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, dan Lamongan.

## 2.5 Potensi Pariwisata

Potensi Pariwisata Berdasarkan Perda Jawa Timur No 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, kawasan peruntukan pariwisata di Provinsi Jawa Timur meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya Tarik wisata hasil buatan manusia.

### a. Daya Tarik Wisata Alam

Daya tarik wisata alam di Provinsi Jawa Timur meliputi:

- Air Terjun Dlundung di Kabupaten Mojokerto;
- Air Terjun Sedudo dan Pemandian Sumber Karya di Kabupaten Nganjuk;
- Air Terjun Madakaripura, Bromo-Ngadisari, dan Pantai Bentar di Kabupaten Probolinggo;
- Air Terjun Watu Ondo di perbatasan Kabupaten Mojokerto, Kota Batu;
- Api Abadi di Kabupaten Pamekasan;

- Arak-Arak di Kabupaten Bondowoso;
- Banyuanget, Gua Gong, Gua Tabuhan, dan Pantai Teleng Ria di Kabupaten Pacitan;
- Bukit Bededung dan Pantai Pasir Putih di Kabupaten Situbondo;
- Coban Glotak, Pantai Balekambang, Pantai Ngliyep di Kabupaten Malang;
- Danau Kastoba dan Pantai Labuhan di Pulau Bawean Kabupaten Gresik;
- Grajagan, Pantai Plengkung, Pantai Sukamade, dan Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi;
- Gua Lowo, Pantai Karanggongso, Pantai Prigi, dan Tirta Jualita di Kabupaten Trenggalek;
- Gua Maharani dan Pantai Tanjung Kodok di Kabupaten Lamongan;
- Gunung Kelud di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri;
- Gunung Wilis di Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung;
- Hutan Bambu, Pantai Watu Godeg, Ranu Bedali, Ranu Klakah, dan Ranu Pane di Kabupaten Lumajang;
- Hutan Surya, Pemandian Talun, dan Waduk Pondok di Kab Ngawi;
- Kakek Bodo di Kabupaten Pasuruan;
- Kayangan di Kabupaten Bojonegoro;
- Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso;
- Pantai Lombang dan Pantai Slopeng di Kabupaten Sumenep;
- Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung;
- Pantai Rongkang di Kabupaten Bangkalan;
- Pantai Watu Ulo di Kabupaten Jember;
- Pemandian Air Panas Cagar Tahura R. Soerjo di Kota Batu;
- Tahura R. Soeryo di Kabupaten Jombang, Kabupaten Malang,
- Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Batu;
- Taman Nasional Bromo–Tengger–Semeru (BTS) di Kabupaten Lumajang, Malang, Pasuruan, dan Probolinggo;
- Telaga Ngebel dan Tirta Manggolo di Kabupaten Ponorogo; dan Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan.

**b. Daya Tarik Wisata Budaya**

Daya tarik wisata budaya di Provinsi Jawa Timur meliputi:

- Asta Yusuf, Asta Tinggi, Keraton, Masjid Agung, dan Museum di Kabupaten Sumenep;
- Candi Jabung di Kabupaten Malang;
- Candi Jabung Tirta di Kabupaten Probolinggo;
- Candi Penampihan di Kabupaten Tulungagung;
- Candi Penataran di Kabupaten Blitar;
- Gereja Poh Sarang dan Petilasan Jayabaya di Kabupaten Kediri;
- Gua Akbar, Makam Bkti Harjo, Makam Ibrahim Asmorokondi, dan Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban;

- Kompleks Makam K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wachid Hasyim, Gus Dur, dan Sayid Sulaiman di Kabupaten Jombang;
- Makam Aer Mata Ebu di Kabupaten Bangkalan;
- Makam Batoro Katong di Kabupaten Ponorogo;
- Makam Proklamator Bung Karno di Kota Blitar;
- Makam Ratu Ebu di Kabupaten Sampang;
- Makam Sunan Ampel dan Mbah Bungkul di Kota Surabaya;
- Makam Sunan Drajat di Kabupaten Lamongan;
- Makam Sunan Giri, Makam Maulana Malik Ibrahim, dan Fatimah Binti Maemun di Kabupaten Gresik;
- Makam Troloyo di Kabupaten Mojokerto;
- Pura Mandara Giri Semeru Agung di Kabupaten Lumajang; dan Situs Peninggalan Budaya Majapahit di Kabupaten Mojokerto.

**c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia**

Daya tarik wisata hasil buatan manusia di wilayah Jawa Timur meliputi:

- Bendungan Widas dan Taman Umbul Kab Madiun;
- Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) di Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya;
- Kebun Binatang Surabaya di Kota Surabaya;
- Kebun Raya Purwodadi & Pemandian Banyubiru di Kab Pasuruan;
- Kolam Renang Ubalan di Kabupaten Mojokerto;
- Pemandian Blambangan, Pemandian Kebon Agung, dan Pemandian Petemon di Kabupaten Jember;
- Pemandian Talun & Waduk Pondok Kabupaten Ngawi;
- Sumber Boto dan Tirta Wisata di Kabupaten Jombang;
- Taman Kosala Tirta, Taman Manunggal, & Tirtosari di Kab Magetan;
- Taman Safari di Kabupaten Pasuruan;
- Taman Sengkaling dan Waduk Selorejo Kab Malang;
- Taman Suruh di Kabupaten Banyuwangi;
- Ubalan Kalasan di Kabupaten Kediri;
- Waduk Gondang dan Wisata Bahari Lamongan (WBL) di Kabupaten Lamongan; dan
- Waduk Wonorejo di Kabupaten Tulungagung.

**3. Wilayah Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana. Di wilayah Provinsi Jawa Timur, kawasan rawan bencana dikelompokkan dalam kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana gelombang pasang, kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran hutan serta kawasan rawan angin kencang dan puting beliung. Dengan adanya bencana ini dapat berakibat rusaknya lingkungan secara menyeluruh. Dengan demikian harus melakukan antisipasi

terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi, melalui pembentukan suatu tatanan baik upaya deteksi gempa, melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini.

3.1 Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Kriteria penetapan kawasan rawan tanah longsor menurut PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.

Ada 6 jenis tanah longsor, yakni: longsor translasi, longsor rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis longsor translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan longsor yang paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan. Wilayah rawan longsor di Jawa Timur dengan potensi gerakan tanah menengah-tinggi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.7  
Wilayah Potensi Tanah Longsor di Provinsi Jawa Timur

KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	POTENSI GERAKAN TANAH
KABUPATEN NGAWI	WIDODAREN, JOGOROGO PITU, KEDUNGGALAR, PARON	Menengah-Tinggi
KABUPATEN TUBAN	BANCAR, TAMBAKBOYO, KEREK, RENGEL, MONTONG	Menengah
KABUPATEN BOJONEGORO	NGAMBON, PURWOSARI	Menengah
KABUPATEN MAGETAN	PONCOL, MAGETAN, PANEKAN, PLAOSAN, PARANG	Menengah-Tinggi
KABUPATEN MADIUN	KARE, GEMARANG, WUNGU, DAGANGAN	Menengah-Tinggi
KABUPATEN NGANJUK	LOCERET, GONDANG, SAWAHAN	Menengah
KABUPATEN PONOROGO	NGRAYUN, SAWOO, SAMPUNG, SAMBIT, SLAHUNG, BUNGKAL, BADEGAN, SOKO, MLARAK, PULUNG, NGEBEL	Menengah-Tinggi
KABUPATEN PACITAN	NAWANGAN, BANDAR, TEGALOMBO, NGADIREJO TULAKAN, ARJOSARI, KEBONAGUNG, PACITAN PRINGKUKU, PUNUNG, DONOREJO	Menengah-Tinggi
KABUPATEN TRENGGALEK	BENDUNGAN, MUNJUNGAN, TUGU, DURENAN, KARANGAN, PULE, PANGGUL, DONGKO, KAMPAK, WATULIMO, MUNJUNGAN	Menengah-Tinggi
KABUPATEN KEDIRI	GROGOL, SEMEN, MOJO	Menengah-Tinggi
KABUPATEN TULUNGAGUNG	PAGERWOJO, SENDANG, KAUMAN, KARANGREJO, BANDUNG, KALIDAWIR, REJOTANGAN, BESUKI	Menengah-Tinggi
KABUPATEN BLITAR	BAKUNG, WONOTIRTO, KADEMANGAN, SUTOJAYAN, PANGGUNGREJO	Menengah-Tinggi
KABUPATEN MALANG	PONCOKUSUMO, JABUNG, SUMBERMA NJING, BATU, PAU, KALIPARE	Menengah
KABUPATEN LUMAJANG	TEMPURSARI, PRONOJIWO, SENDURO, RANDUGUNG, KLAKAH	Menengah-Tinggi
KABUPATEN PASURUAN	LUMBANG, TUTUR, TOLASARI	Menengah

KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	POTENSI GERAKAN TANAH
KABUPATEN PROBOLINGGO	LUMBANG, SUKAPURA, SUMBER, GADING, KRUCIL	Menengah-Tinggi
KABUPATEN JEMBER	PANTI, TEMPUREJO, TANGGUL, JEBUG, BANGSALSARI, ARJASA, RAMBIPUJI, MUNJULSARI, SUKORAMBI	Menengah-Tinggi
KABUPATEN SITUBONDO	BUNGATAN, SUMBERMALANG, JATIBANTENG, BANYUGLUGUR, KENDIT	Menengah-Tinggi
KABUPATEN BONDOWOSO	PAKEM, CURAH DAMI, GRUJUGAN, MAESAN, KLABANG	Menengah-Tinggi
KABUPATEN BANYUWANGI	KALIPIRO, WONGSOREJO	Menengah-Tinggi
KOTA BATU	JUNREJO, BATU, BUMIAJI	Menengah-Tinggi

Sumber: RTRW Jawa Timur

- Keterangan:**
- Menengah : Daerah yang mempunyai potensi Menengah untuk terjadi Gerakan Tanah. Pada Zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan diatas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.
- Tinggi : Daerah yang mempunyai potensi Tinggi untuk terjadi Gerakan Tanah. Pada Zona ini dapat terjadi Gerakan Tanah jika curah hujan diatas normal, sedangkan gerakan tanah lama dapat aktif kembali.

3.2 Wilayah Rawan Gelombang Pasang

Gelombang pasang merupakan gelombang yang ditimbulkan oleh gaya tarik menarik antara bumi dengan planet-planet lain terutama dengan bulan dan matahari, gelombang ini mempunyai periode sekitar 12,4 jam dan 24 jam. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional kriteria kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari. Kawasan rawan gelombang pasang di Provinsi Jawa Timur berada di kawasan sepanjang pantai di wilayah Jawa Timur baik yang berbatasan dengan Laut Jawa, Selat Bali, Selat Madura, Samudera Hindia maupun di kawasan kepulauan.

3.3 Wilayah Rawan Bencana Banjir

Banjir adalah suatu keadaan sungai, dimana aliran sungai tidak tertampung oleh palung sungai, sehingga terjadi limpasan dan atau genangan pada lahan yang semestinya kering. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Lokasi dengan potensi banjir di Provinsi Jawa Timur meliputi:

**Tabel 2.8**  
**Lokasi Potensi Banjir di Provinsi Jawa Timur**

Kabupaten/Kota	Area/Kecamatan	Tingkat Potensi Banjir
Bangkalan	Bangkalan	Potensi Menengah
Banyuwangi	Glagah	Potensi Menengah
Blitar	Udanawu, Ponggok, Bakung, Kesamben	Potensi Menengah
Bojonegoro	Kasiman, Padangan, Kalitidu, Bojonegoro	Potensi Menengah
Bondowoso	Grujugan, Tegalampel, Cerme	Potensi Menengah
Gresik	Gresik	Potensi Tinggi
Jember	Silo	Potensi Menengah
Jombang	Megaluh	Potensi Menengah
Kediri	Semen, Grogol, Pagu, Pare, Puncu, Wates	Potensi Menengah
Lamongan	Sekaran, Babat, Laren, Karanggeneng, Deket, Lamongan, Sukodadi	Potensi Tinggi
Lumajang	Tempeh, Tempursari, Pronojiwo	Potensi Menengah
Madiun	Kebonsari, Sawahan, Wonosari	Potensi Menengah
Magetan	Plaosan, Bendo, Kawedanan	Potensi Menengah
Malang	Kepanjen, Pakisaji	Potensi Menengah
Mojokerto	Jatiroto, Mojokerto, Bangsal, Mojosari, Pungging	Potensi Menengah
Nganjuk	Rejoso	Potensi Menengah
Ngawi	Ngrambe, Padas	Potensi Menengah
Pacitan	Ngadirojo, Kebonagung	Potensi Menengah
Pasuruan	Purwosari, Kraton	Potensi Menengah
Ponorogo	Jetis, Kauman, Siman	Potensi Menengah
Probolinggo	Kota Anyar, Paiton	Potensi Menengah
Sampang	Sreseh, Jrengik, Sampang	Potensi Menengah
Sidoarjo	Krian, Taman, Sidoarjo	Potensi Menengah
Situbondo	Sumbermalang, Situbondo	Potensi Menengah
Sumenep	Sumenep	Potensi Rendah
Trenggalek	Pule	Potensi Menengah
Tuban	Jatirogo, Bancar, Tuban	Potensi Menengah
Tulungagung	Pagerwojo, Gondang, Kalidawir	Potensi Menengah
Kota Pasuruan	Rejoso	Potensi Rendah
Kota Surabaya	sebagian besar wilayah Kota Surabaya	Potensi Menengah
Kota Malang	Wilayah Kota Bagian tengah dan timur	Potensi Rendah

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur

**3.4 Wilayah Rawan Kebakaran Hutan**

Kebakaran hutan merupakan peristiwa dimana terbakarnya hutan atau adanya titik-titik api/panas yang rentan terbakar. Kebakaran hutan secara alami umumnya disebabkan oleh faktor cuaca dan iklim, aliran magma/lava/lahar dari letusan gunungberapi, maupun pada lahan gambut. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan angin kencang di Jawa Timur meliputi kawasan di Gunung Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Welirang dan Gunung Kelud dan kawasan-kawasan dengan potensi angin puting beliung.

**3.5 Wilayah Rawan Letusan Gunung Api**

Kawasan rawan letusan gunung berapi merupakan kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi terancam bahaya letusan gunung api baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi daerah terlarang, daerah bahaya I,



dan daerah bahaya II. Kawasan rawan letusan gunung berapi di Jawa Timur berada pada lereng gunung berapi yang masih aktif. Terdapat 7 gunung api aktif di Jawa Timur serta lokasi yang merupakan wilayah rawan. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria penetapan kawasan rawan letusan gunung berapi meliputi: Wilayah di sekitar kawah atau kaldera; dan Wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun.

Tabel 2.9

Kawasan Rawan Letusan Gunung Api di Provinsi Jawa Timur

No	Nama Gunung Api	Kabupaten/Kota	Lokasi Pos Pengamatan
1	Ijen	Bondowoso dan Banyuwangi	Pos pengamatan Gunung Api Kawah Ijen, Dusun Panggung Sari, Desa taman Sari, Licin, Kec.glagah Kab.Banyuwangi
2	Semeru	Malang dan Lumajang	Pos Pengamatan Gunung Api di Gunung Sawur Desa Sumber Wuluh, Kecamatan Candipuro, Kab.Lumajang.
3	Bromo	Malang, Lumajang, Probolinggo dan Pasuruan	Pos Pengamatan Gunung Api di Cemoro Lawang Desa Ngadisari, Kec. Sukapura, Kab.Probolinggo
4	Lamongan	Lumajang dan Probolinggo	Pos Pengamatan di Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang.
5	Arjuno-Welirang	Pasuruan dan Mojokerto	Pos Pengamatan Gunung Api di Kasiman, Desa Sukoreno, Kecamatan prigen, Kabupaten Pasuruan
6	Kelud	Kediri, Blitar dan Malang	Pos Pengamatan Gunung Api di Dusun Margomulyo, Desa Sugih Waras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri
7	Raung	Banyuwangi, Bondowoso dan Jember	Pos Pengamatan Gunung Api di Kp.Mang Desa Sragi, Kecamatan Songon Kabupaten Banyuwangi

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur

3.6 Wilayah Rawan Gempa Bumi

Kawasan Rawan Gempa bumi merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana gempa bumi yang mengakibatkan berguncangnya bumi disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif aktivitas gunung api atau runtuh batuan. Kekuatan gempa bumi akibat aktivitas gunung api dan runtuh batuan relatif kecil sehingga kita akan memusatkan pembahasan pada gempa bumi akibat tumbukan antar lempeng bumi dan patahan aktif. Gempa bumi berlaku setiap hari di bumi, tetapi umumnya berskala kecil, sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Gempa bumi yang kuat mampu menyebabkan kerusakan dan kehilangan nyawa yang besar melalui beberapa cara termasuk retakkan pecah (fault rupture), getaran bumi (gegaran) banjir disebabkan oleh tsunami, lempengan pecah, berbagai jenis kerusakan muka bumi kekal seperti tanah runtuh, tanah lembik, dan kebakaran atau perlepasan bahan beracun.

Kriteria kawasan rawan gempa menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan yang berpotensi dan/atau

pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI). Kawasan rawan bencana gempa bumi di Provinsi Jawa Timur berada di wilayah: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung.

### **3.7 Wilayah Rawan Tsunami**

Penetapan wilayah rawan tsunami didasarkan pada angka kejadian di masa lalu serta keberadaan lempeng tektonik. Berdasarkan kondisi geologi, selain kaya akan sumberdaya alam wilayah selatan Jawa juga merupakan daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana alam, seperti rawan gempa tektonik dan vulkanik disepanjang “ring of fire” dari Sumatra – Jawa – Bali – Nusa Tenggara – Banda – Maluku yang berdampak terhadap adanya bencana tsunami. Di wilayah Jawa Timur wilayah rawan gempa utamanya pada pantai selatan Jawa Timur:

- a. Resiko besar tsunami, meliputi: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek.
- b. Resiko sedang tsunami, meliputi: Kabupaten Malang bagian selatan, Kabupaten Blitar selatan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tulungagung.

### **3.8 Wilayah Rawan Luapan Lumpur**

Kawasan luapan lumpur meliputi area terdampak dari bahaya luapan lumpur, polusi gas beracun, dan penurunan permukaan tanah (land subsidence) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Arahana pengelolaan kawasan luapan lumpur dibagi menjadi

- a. Penanganan luapan lumpur meliputi :
  - Peningkatan kapasitas tampungan kolam lumpur berfungsi melindungi permukiman dan infrastruktur vital.
  - Pemanfaatan debit Kali Porong yang cukup besar di musim hujan untuk melancarkan aliran endapan lumpur.
- b. Penanganan infrastruktur sekitar semburan lumpur meliputi:
  - Penanganan sistem drainase dengan memperbaiki atau membuat saluran drainase baru
  - Normalisasi saluran drainase utama
  - Perbaikan jalan lingkungan untuk mengurangi beban lalu lintas di Jalan Arteri Porong
  - Perbaikan sebagian ruas Jalan Arteri Porong.

- Peningkatan jalan alternatif lainnya sepanjang  $\pm$  14 km untuk mengurangi beban lalu lintas di Jalan Arteri Porong.
  - Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bebas hambatan Surabaya – Gempol, dan
  - konstruksi relokasi pipa air baku PDAM Kota Surabaya
- c. Pengamanan Kali Porong meliputi:
- Penjagaan kapasitas pengaliran Kali Porong.
  - Penjagaan keamanan tanggul dan tebing sungai dengan
  - memasang perlindungan tebing sungai/tanggul.
- d. Penanganan dampak sosial masyarakat akibat luapan lumpur meliputi:
- Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur maupun penurunan tanah;
  - Perlindungan sosial terhadap hak-hak masyarakat atas harta benda miliknya yang hilang atau berkurang karena dampak luapan lumpur; dan
  - Pemulihan sosial masyarakat yang terkena luapan lumpur.

## 4. Demografi

### 4.1 Jumlah Penduduk

**Tabel 2.10**

**Indikator Kependudukan Jawa Timur Tahun 2011-2014**

Uraian	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Jumlah Penduduk (000 Jiwa)	37.841	38.107	38.363	38.610
Laju Pertumbuhan (%)	0,73	0,70	0,67	0,64
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	789	794	800	805

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selama periode 2011-2014 Pertumbuhan jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2011 penduduk Jawa Timur sebanyak 37,8 juta jiwa, meningkat hingga mencapai 38,6 juta jiwa pada tahun 2014 atau tumbuh 2,8 persen. Rata-rata pertumbuhan penduduk selama empat tahun terakhir 0,7 persen, cenderung melambat tiap tahun dari 0,73 persen pada tahun 2011 menjadi 0,64 persen pada tahun 2014. Seiring terjadinya pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk juga semakin meningkat. Sejak tahun 2013 kepadatan penduduk mencapai 800 jiwa per Km<sup>2</sup>.

### 4.2 Ketenagakerjaan

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran adalah Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT), yang merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja, dengan perkembangan seperti berikut :

**Tabel 2.11**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama**  
**Jawa Timur Tahun 2012–2014**

NO	JENIS KEGIATAN UTAMA	SATUAN	TAHUN		
			2012*)	2013*)	2014**)
1	Angkatan Kerja	Ribu Orang	20.238,06	20.432,45	20.149,99
	> Berkerja	Ribu Orang	19.411,26	19.553,91	19.306,51
	> Pengangguran	Ribu Orang	826,80	878,54	843,49
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,57	69,78	68,12
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,09	4,30	4,19
4	Pekerja Tidak Penuh	Ribu Orang	6.390,92	6.472,06	6.481,52
	> Setengah Penganggur	Ribu Orang	2.245,22	1.946,38	1.674,50
	> Paruh Waktu	Ribu Orang	4.145,70	4.526,68	4.807,02

Sumber : BPS Provinsi Jawa timur

\*) Agustus 2012-Agustus 2013 merupakan hasil backcasting dengan menggunakan penimbang jumlah penduduk hasil Proyeksi Penduduk SP2010

\*\*) Estimasi ketenagakerjaan Februari-Agustus 2014 yang telah menggunakan penimbang jumlah penduduk hasil Proyeksi Penduduk SP2010

Keadaan ketenaga kerjaan di Jawa Timur pada Agustus 2014 digambarkan dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk yang bekerja yang berimbang menurunkan tingkat pengangguran terbuka selama setahun terakhir. Jumlah angkatan kerja berkurang sekitar 282,45 ribu orang dalam kurun waktu setahun (Agustus 2013 - Agustus 2014). Penduduk yang bekerja berkurang 247,40 ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Sementara jumlah penganggur juga turun sebanyak 35,05 ribu orang jika dibanding keadaan setahun sebelumnya. Namun demikian, jika dibandingkan antara hasil Sakernas Februari 2014 dengan Sakernas Agustus 2014, ada kenaikan persentase pengangguran, yaitu dari 4,02 persen (Februari 2014) menjadi 4,19 persen (Agustus 2014).

Struktur lapangan pekerjaan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja hingga Agustus 2014 tidak mengalami perubahan. Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Sektor Industri Pengolahan, dan sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan secara berurutan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur. Pada Agustus 2014, sektor Pertanian dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 37,61 persen, Sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi menyerap sebanyak 20,86 persen, sedangkan untuk Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan masing-masing dapat menyerap tenaga kerja sekitar 14 persen.

**4.3 Pendidikan**

Pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2010-2014, telah berhasil meningkatkan akses dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan Jawa

Timur dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, dan tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan suatu indikator kunci keberhasilan pembangunan pendidikan. Angka Rata-rata Lama Sekolah terus meningkat dari 7,22 persen tahun 2010 menjadi 8,57 persen pada tahun 2014, selanjutnya Angka Melek Huruf pada tahun 2011 sebesar 99,29 persen meningkat menjadi 99,69 persen tahun 2014. Demikian pula untuk Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan meningkat pada semua jenjang pendidikan.

**2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 DAN REALISASI RPJMD**

**2.2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah**

Kinerja pembangunan Jawa Timur tahun 2014 diukur berdasarkan pada 8 (delapan) indikator kinerja utama yaitu : Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Kualitas Air Sungai. Target capaian indikator kinerja utama selama lima tahun ke depan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.12**  
**Matrik Penetapan Indikator Utama**

No.	Indikator		Target					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)		6,56 - 6,87	6,88 - 7,19	7,20 - 7,49	7,5 - 8,00	8,01 - 8,10	8,11 - 8,20
2	Indeks Gini		0,363 - 0,360	0,359 - 0,356	0,355 - 0,352	0,351 - 0,348	0,347 - 0,341	0,340 - 0,338
3	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia (% Proporsi Kelompok 40% bawah )		20,41 - 20,75	20,76 - 20,89	20,90 - 20,95	20,96 - 21,01	21,02 - 21,08	21,14 - 21,18
4	Tingkat Kemiskinan (%)		12,72 - 12,22	12,21 - 11,73	11,72 - 11,22	11,21 - 10,71	10,70 - 10,20	9,97 - 9,47
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		4,32 - 4,23	4,22 - 4,13	4,12 - 4,03	4,02 - 3,93	3,92 - 3,83	3,60 - 3,54
6	Indeks Pembangunan Manusia		73,15 - 73,45	73,46 - 74,37	74,38 - 75,52	75,53 - 76,29	76,30 - 77,57	77,58 - 79,01
7	Indeks Pembangunan Gender		67,18 - 67,78	67,79 - 68,39	68,40 - 69,00	69,01 - 69,61	69,62 - 70,29	70,30 - 70,90
8	Kualitas Air Sungai	a. BOD (mg/l)	3,59 - 3,57	3,58 - 3,56	3,57 - 3,55	3,56 - 3,54	3,55 - 3,53	3,54 - 3,52
		b. COD (mg/l)	10,91 - 10,86	10,87 - 10,83	10,84 - 10,80	10,81 - 10,77	10,78 - 10,74	10,75 - 10,71

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Jawa Timur lima tahun kedepan. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan diupayakan dapat

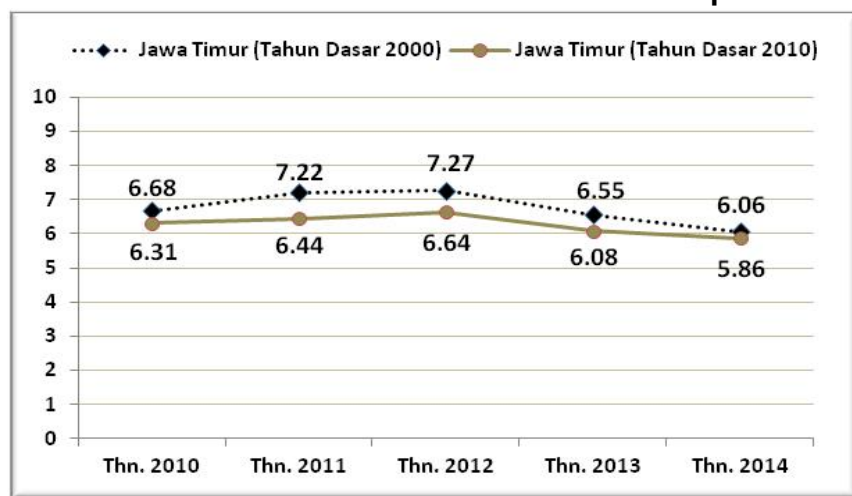
menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Di samping hal tersebut, seluruh pelaksanaan pembangunan di wilayah Jawa Timur diupayakan mampu menjaga keselarasan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Pertumbuhan Ekonomi (%)

Pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur bersama masyarakat, utamanya bidang ekonomi semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000. Untuk perhitungan PDRB pada tahun 2014 ini telah menggunakan tahun dasar 2010 sedangkan tahun sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000.

Gambar 2.4

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Terhadap Nasional



Sumber : BPS Prov Jatim

Apabila dihitung menggunakan tahun dasar 2000, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami perlambatan dari 6,68 persen pada tahun 2010 menjadi 6,06 persen pada tahun 2014. Untuk total nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2010 sebesar Rp. 778,564 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp. 1.291,998 triliun pada tahun 2014. Selanjutnya PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), total nilai PDRB Jawa Timur tahun 2010 sebesar Rp. 342,280 triliun meningkat menjadi Rp. 444,855 triliun tahun 2014.

Sedangkan menggunakan tahun dasar 2010, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami penurunan dari 6,31 persen pada tahun 2010 menjadi



5,86 persen pada tahun 2014. total nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Jawa Timur tahun 2010 sebesar Rp. 990,649 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp. 1.540,696 triliun pada tahun 2014. Selanjutnya PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), total nilai PDRB Jawa Timur tahun 2010 sebesar Rp. 990,648 triliun meningkat menjadi Rp. 1.262,700 triliun tahun 2014.

## 2. Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan Indeks gini. Caranya adalah dengan membagi penduduk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan. Indeks gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat 3 kelompok ketimpangan, tinggi jika nilai koefisien gini 0,50 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,3-0,5 dan rendah jika kurang dari 0,3.

**Tabel 2.13**  
**Indeks Gini Nasional dan Pulau Jawa**  
**Tahun 2010-2014**

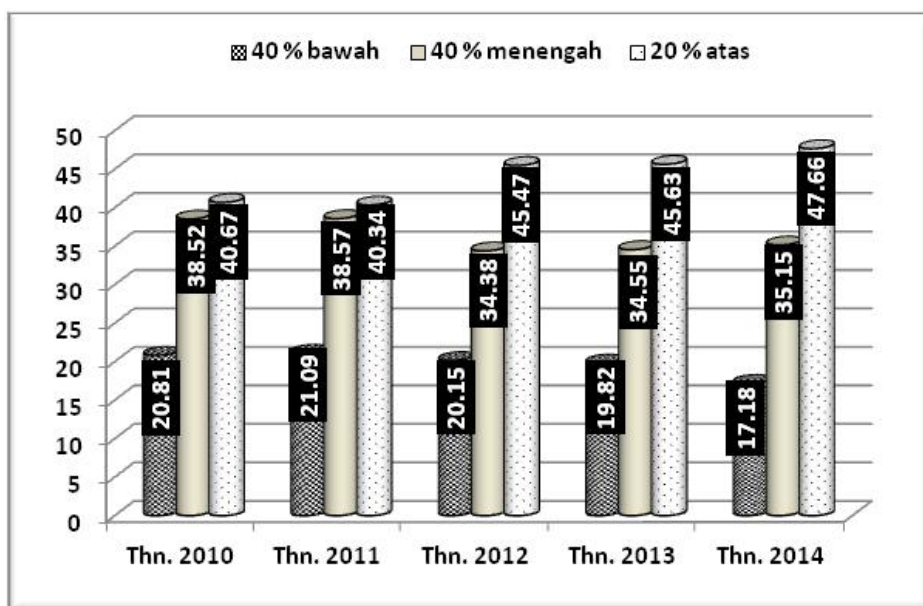
PROVINSI	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
DKI Jakarta	0,36	0,44	0,42	0,43	0,44
Jawa Timur	0,34	0,37	0,36	0,36	0,40
Jawa Barat	0,36	0,41	0,41	0,41	0,40
Jawa Tengah	0,34	0,38	0,38	0,39	0,39
Banten	0,42	0,40	0,39	0,40	0,42
DI Yogyakarta	0,41	0,40	0,43	0,44	0,43
NASIONAL	0,38	0,41	0,41	0,41	0,41

Sumber : BPS RI

Selama kurun waktu tahun 2010-2011 nilai indeks gini di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan kearah peningkatan, namun pada tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 0.01 dibandingkan tahun 2011. Sedangkan tahun 2012-2013 tidak mengalami perubahan yaitu 0,36 dan pada tahun 2014 meningkat kembalimenjadi 0,40. Kondisi tersebut, masih lebih baik bila dibandingkan nilai indeks gini Nasional dan DKI Jarata serta termasuk dalam kategori ketimpangan sedang (antara 0,3- 0,5).

### 3. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

**Gambar 2.5**  
**Persentase Distribusi Pengeluaran Penduduk**  
**Tahun 2010-2014**



Sumber : BPS Prov Jatim

Pemerataan pendapatan ini diperhitungkan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu dengan mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan. 40% penduduk berpendapatan rendah; 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan sebagai berikut :

1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
2. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
3. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Dari pengukuran pemerataan pendapatan berdasarkan versi Bank Dunia, menunjukkan bahwa kelompok yang mempunyai pendapatan berkategori pendapatan 20 persen keatas pada tahun 2010 sebesar 40,67

persen, meningkat menjadi 47,66 persen pada tahun 2014. Untuk kelompok pendapatan 40 persen menengah pada tahun 2010 sebesar 38,52 persen dan menurun pada tahun 2014 menjadi 35,15 persen. Selanjutnya 40 persen terbawah di Jawa Timur pada tahun 2009 sebesar 20,81 persen, kemudian menurun menjadi 17,18 persen pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok ketimpangan pendapatan 40 persen terendah yang terjadi di Jatim pada tahun 2014 termasuk kategori rendah.

#### 4. Tingkat Kemiskinan (%)

Gambar 2.6

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin  
Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014



Sumber : BPS Prov Jatim

Proses pembangunan merupakan proses transformasi masyarakat secara keseluruhan untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup sejalan dengan proses transportasi ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan dilaksanakan untuk mengatasi kemiskinan baik absolute maupun relatif. Oleh karena itu permasalahan kemiskinan secara integral merupakan bagian dari problematika pembangunan yang harus ditanggulangi.

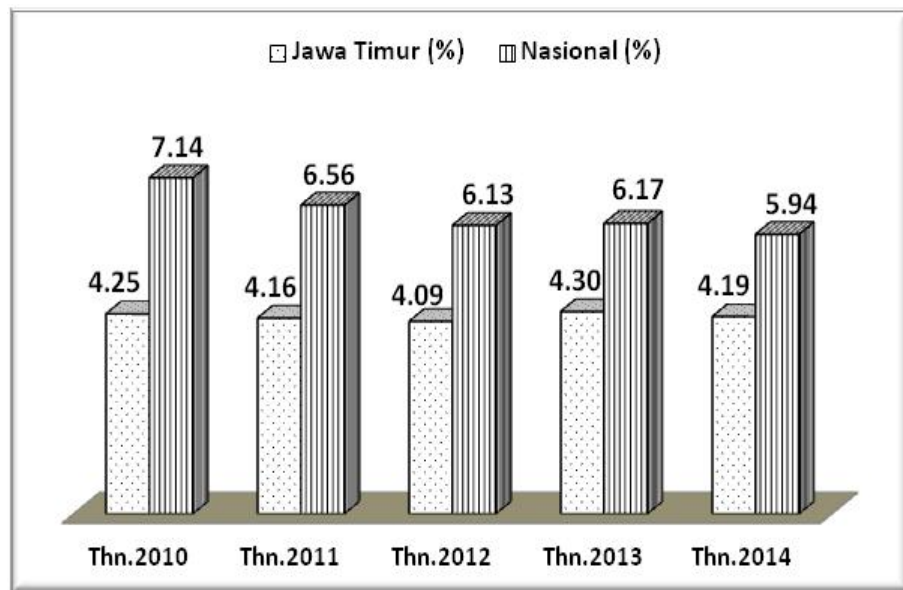
Jumlah dan persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada periode 2010-2014 menunjukkan tren penurunan. Jumlah penduduk miskin nampak terjadi penurunan dari 15,26 persen pada tahun 2010 menjadi 12,28 persen pada tahun 2014. Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2010 sebesar 6,02 juta orang, Dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2014 yang berjumlah 4,89 juta, berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 1,12 juta orang. Turunnya persentase penduduk miskin selama periode tahun 2010-2014, sebagai wujud upaya keras Pemerintah Pusat

maupun Daerah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Berbagai upaya dan strategi yang dilakukan memberikan kontribusi penurunan kemiskinan dengan tetap meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan.

## 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Gambar 2.7

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  
Di Jawa Timur Tahun 2010-2014



Sumber : BPS Prov Jatim

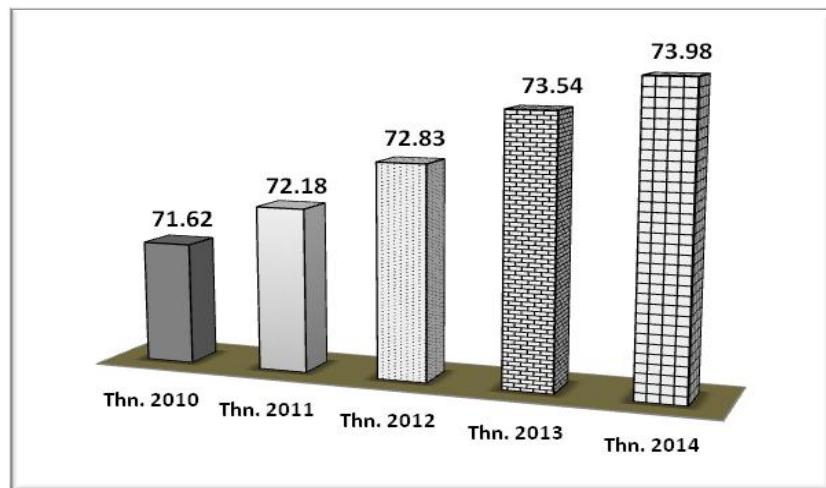
Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ). Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun secara terpaksa mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan.

Dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode tahun 2010-2012 menunjukkan tren penurunan yaitu dari 4,25 persen tahun 2010 menjadi 4,09 persen tahun 2012. Selajutnya pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 4,30 persen dan tahun 2014 menurun kembali menjadi 4,19 persen. Sedangkan untuk jumlah angkatan kerja, pada tahun 2010 mencapai 19,52 juta orang, kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 20,14 juta orang.

## 6. Indeks Pembangunan Manusia

**Gambar 2.8**

**Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur  
Tahun 2010-2014**



*Sumber : BPS Prov Jatim*

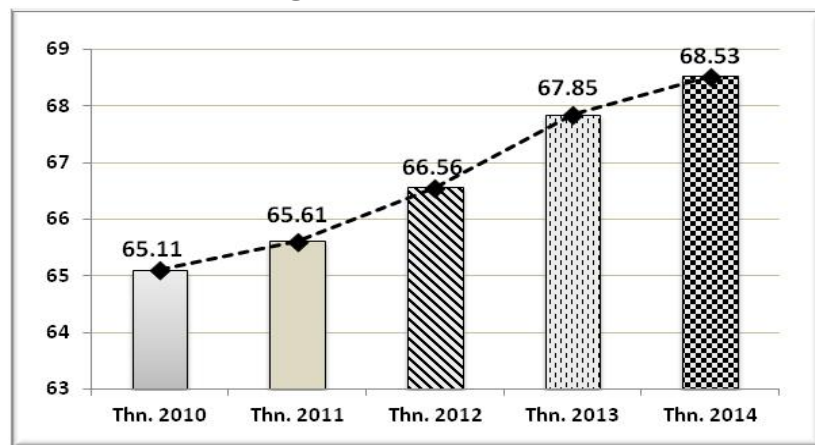
Seberapa jauh pertumbuhan ekonomi berdampak pada pembangunan manusia, dapat dijelaskan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan mengevaluasi angka IPM, keterbandingan/posisi pembangunan manusia antar kabupaten /kota di Jawa Timur dapat diketahui baik dari angka IPMnya sendiri maupun dari tiga komponen pembentuknya, yaitu kesehatan (Angka Usia Harapan Hidup), pencapaian tingkat pendidikan (Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf), serta pengeluaran riil per kapita guna akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. Selama periode tahun 2010-2013 angka IPM di Jawa Timur secara umum menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2010 nilainya 71,62, dan selanjutnya meningkat terus menjadi 72,18 (2011); 72,83 (2012); 73,54 (2013) dan pada tahun 2014 mencapai 73,98.

## 7. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan Ukuran yang dipakai untuk menyoroti tentang status perempuan khususnya mengukur prestasi dalam kemampuan dasar. Melalui IPG perbedaan pencapaian yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dapat dijelaskan.

Gambar 2.9

**Indeks Pembangunan Gender Tahun 2010-2014**



Sumber : BPS Pusat

Indeks pembangunan gender (IPG) dari waktu ke waktu memperlihatkan perkembangan yang semakin membaik. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan IPG selama kurun waktu tahun 2010-2014, dimana berturut-turut mencapai 65,11 (2010); 65,61 (2011); 66,56 (2012); 67,16 (2013) dan 68,53 (2014).

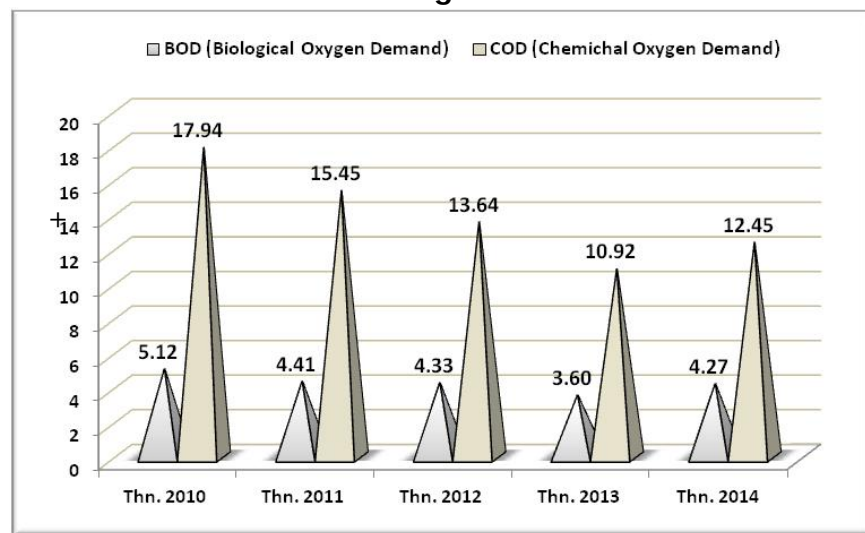
## 8. Kualitas Air Sungai

Sesuai perkembangan ekonomi dan pertumbuhan industri di DAS Brantas, pada saat ini potensi industri terdapat  $\pm 1.004$  buah dengan jumlah industri potensi pencemar  $\pm 483$  buah, dikali Surabaya 65 industri dan DAS Brantas 33 industri. Umumnya sumber pencemar berasal dari limbah domestik sebesar 50%, limbah industri sebesar 40 %, limbah pertanian dan sebagainya sebesar 10%. Terkait hal tersebut kondisi kualitas air belum mencapai baku mutu lingkungan yang ditetapkan, sehingga perlu adanya penurunan beban pencemar. konsentrasi BOD dan COD sebagai indikator perubahan kualitas air sungai di DAS Brantas. Kedua parameter ini dapat mewakili keterukuran cemaran material organik yang dihasilkan oleh berbagai jenis sumber pencemar seperti: domestik, industri, pertanian, dan kegiatan usaha lain. Semakin besar nilai BOD dan COD berarti semakin besar pula tingkat pencemarannya. Selama periode 2010-2014, menunjukan perbaikan dengan indikator penurunan konsentrasi BOD dari 5.12 mg/l menjadi 4,27 mg/l dan COD dari 17,94 mg/l menjadi 12,45 mg/l. Namun jika dilihat dari konsentrasi BOD dan COD, dapat dicermati bahwa konsentrasi BOD dan COD pada tahun 2014 lebih tinggi daripada tahun 2013, yang berarti bahwa terdapat penurunan kondisi kualitas air.



**Gambar 2.10**

**Kualitas Air Sungai Tahun 2010-2014**



Sumber : Badan Lingkungan Hidup Prov Jatim

## 2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Oleh karena itu dan permasalahan pembangunan di Jawa Timur sampai dengan tahun 2014 ini adalah sebagai berikut :

### 1. Bidang Urusan Pendidikan

- 1) Angka Partisipasi Kasar SMP masih rendah dibanding rata-rata APK SMP Provinsi Jawa Timur, tingginya angka putus sekolah, faktor ekonomi orang tua rendah, perkawinan dini, maupun akibat dari keluarga kurang harmonis (broken home), Adanya daerah terpencil yang relatif sulit dijangkau, namun dengan jumlah penduduk yang sedikit
- 2) Angka melek huruf yang masih rendah, Data ABH tidak valid
- 3) Belum semua desa mempunyai pendidikan anak usia dini (PAUD), Kesadaran orang tua tentang pentingnya PAUD masih kurang, Kompetensi guru PAUD Non Formal yang masih rendah
- 4) Masih banyaknya ruang kelas yang rusak, dan jumlah ruang kelas tidak sebanding dengan rombongan belajar dan siswa, terutama terkait dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), jumlah lembaga sekolah masih terbatas keberadaannya, belum semua memiliki Laboratorium (sains, komputer, dan bahasa), dan perpustakaan
- 5) Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan.

- 6) Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi serta belum semua memiliki sertifikat sebagai pendidik, Tenaga pendidik tidak sesuai bidang studi yang ditempuh dengan bidang studi yang diajarkan, Masih terdapat guru yang belum berkualifikasi 'S-1/D4', dan sertifikat sebagai pendidik, Belum semua guru memiliki semangat mau mengabdikan di daerah terpencil/terisolir/jauh dari ibu kota kecamatan
- 7) Belum optimalnya pendataan terhadap semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia sekolah, Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik pada pendidikan khusus dan layanan khusus, Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, sehingga masyarakat belum mau mengirim anaknya yang cacat ke sekolah, Fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belum tersedia secara memadai;
- 8) Masih terjadi kesenjangan layanan pendidikan diniyah dengan pendidikan umum.
- 9) Belum optimalnya peran serta masyarakat dan orangtua sebagai supporting, controlling, dan advisory bagi pendidikan putra-putrinya
- 10) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Pendidikan Keayah Bundaan
- 11) Kewenangan Pendidikan Menengah kembali menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi

## **2. Bidang Urusan Kesehatan**

- 1) Belum semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, belum semua bayi memperoleh pelayanan neonatal (0-28 hari) secara memadai serta adanya penyakit lain yang dapat menyebabkan kematian bayi
- 2) Adanya penolakan imunisasi dikarenakan masyarakat takut adanya efek samping vaksinasi dan ragu tentang kehalalan vaksin, Desa Non *Universal Coverage Immunization* (UCI) masih 111 Desa (30%)
- 3) ANC tidak sesuai standar sehingga kemungkinan deteksi dini terhadap penyakit tertentu tidak ditata laksana dengan baik, kurangnya pendampingan petugas terhadap bumil resiko tinggi di wilayah, kurang kepatuhan petugas terhadap SOP APN, terlambat penanganan di tempat rujukan karena diagnosis kurang tepat sehingga penanganan kurang memenuhi syarat

- 4) Masih adanya kasus gizi kurang dan gizi buruk pada Ibu Hamil, Bayi dan Balita
- 5) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang terdapat di desa (Ponkesdes, Poskesdes, Polindes)
- 6) Pola asuh orang tua tentang gizi yang kurang tepat
- 7) Belum semua masyarakat terutama di daerah terpencil mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
- 8) Minimnya puskesmas, puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling dalam kondisi baik
- 9) Masih Banyak Masyarakat yang tidak terkover BPJS Kesehatan (sebagai Penerima PBI) seperti Balita Gizi Buruk, bayi dari keluarga miskin, Pasung, PMKS.
- 10) Belum semua Pekerja Formal di Jawa Timur Terkover oleh Program Jaminan Sosial baik Kesehatan maupun ketenagakerjaan
- 11) Masih adanya beberapa daerah kumuh yang memiliki sanitasi buruk dengan sosialisasi dan fasilitasi pola hidup sehat.
- 12) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan produktif serta menjaga lingkungan terhadap timbulnya penyakit menular;
- 13) Masih ditemukan masyarakat yang belum memiliki jamban sehat.
- 14) Belum optimalnya penanganan Penyakit menular yang dipengaruhi kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta makin meningkatnya kasus penyakit degeneratif, terutama pada usia lanjut seiring dengan bertambahnya umur serta peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga pola konsumsi gizi masyarakat yang cenderung berubah ke arah makanan cepat saji, juga diakibatkan kurangnya aktivitas fisik.
- 15) Tingginya kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) khususnya untuk daerah yang menjadi endemic
- 16) Kasus HIV/AIDS yang meningkat secara signifikan dibeberapa daerah
- 17) Belum adanya Data yang valid terkait berapa penderita HIV –AIDS
- 18) Masih belum maksimalnya program dan kegiatan dalam penanganan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza)
- 19) Kurangnya tenaga medis dan paramedis (dokter, dokter spesialis, bidan, perawat)
- 20) Masih kurangnya sarana/prasarana kesehatan di puskesmas dan jaringannya.

- 21) Sebagian besar Poskesdes masih berstrata pratama; Sarana dan prasarana yang masih terbatas di tingkat poskesdes;

### **3. Bidang Urusan Lingkungan Hidup**

- 1) Terjadinya longsor dan banjir di beberapa wilayah Jawa Timur mengindikasikan masih adanya lahan kosong/kritis di dalam dan/atau luar kawasan hutan yang antara lain disebabkan oleh pembalakan liar dan alih fungsi lahan.
- 2) Kondisi DAS Brantas yang semula memiliki 1.577 sumber air dan yang berada di Malang Raya sejumlah 467, saat ini yang berfungsi hanya 230, serta yang berada di Kota Batu 118 yang berfungsi hanya 57 sumber air.
- 3) Tingginya pencemaran dan perusakan lingkungan, terutama pada media air sungai utama Jawa Timur, yaitu Sungai Brantas, yang ditunjukkan oleh hasil pemantauan kualitas air Sungai Brantas pada Tahun 2014, khususnya pada parameter BOD yakni sebesar 4,27 mg/l yang berarti masih belum memenuhi baku mutu air kelas II yang dipersyaratkan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yakni sebesar 3 mg/l.
- 4) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- 5) Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Demikian juga Jawa Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan langkah-langkah mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), yang telah diturunkan dalam bentuk Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 67 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Tahun 2011 – 2020.
- 6) Adapun sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan iklim juga telah ditetapkan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API), yang juga perlu segera direspon dalam bentuk rumusan langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan iklim di tingkat Provinsi Jawa Timur.

### **4. Bidang Urusan Pekerjaan Umum**

#### **a. Kebinamargaan**

- 1). Kurangnya pertambahan panjang jalan baru

Penambahan kapasitas jalan melalui peningkatan struktur maupun peningkatan lebar jalan sudah tidak lagi mampu mengimbangi laju Pertumbuhan kendaraan di perkotaan, sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas jalan melalui pertambahan panjang jalan baru

- 2). Kurang memadainya kapasitas jalan akses menuju kawasan bandara Abdulrachman Saleh dan pelabuhan utama maupun panjang Ramp/Exit Jalan Tol

Beberapa Ramp/Exit Jalan Tol Surabaya-Mojokerto terlalu pendek sehingga berpotensi menimbulkan rugi ekonomi Jawa Timur akibat kemacetan

- 3). Minimnya alokasi pendanaan dan penyelesaian pembebasan lahan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS)
- 4). Kurangnya pembangunan Flyover dan Underpass untuk mengatasi kemacetan tengah kota
- 5). Kurangnya pembangunan drainase jalan
- 6). Kurangnya pembangunan Drainase Jalan dapat mempercepat kerusakan jalan akibat air yang tergenang maupun gerusan air yang mengalir

#### **b. Sumber Daya Air**

- 1) Meningkatnya laju erosi dan sedimentasi
- 2) Kekurangan ketersediaan air baku untuk keperluan domestik
- 3) Sulitnya penyelesaian pembebasan lahan pembangunan waduk pada lahan perhutani
- 4) Belum optimalnya pelayanan dan penyediaan air baku
- 5) Konflik masyarakat terhadap pengambilan air di sumber mata air
- 6) Kurangnya ketersediaan air khususnya pada musin kemarau
- 7) Tingginya volume air sumber yang terbuang terus menerus mengalir ke sungai
- 8) Kurang optimalnya fungsi sarana dan prasarana sda di daerah hulu
- 9) Banjir dan longsor terjadi setiap tahun
- 10) Penanganan banjir bersifat parsial, sistem penanganann banjir terpadu belum optimal

#### **c. Permukiman**

- 1) Masih rendahnya Cakupan pelayanan dan fasilitas pelayanan air minum dan sanitasi
- 2) Keterbatasan sumber mata air dan semakin menurunnya kualitas sumber air

- 3) Masih lemahnya kelembagaan pengelola air minum dan sanitasi
- 4) Keterbatasan lahan untuk pengembangan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi
- 5) Belum optimalnya pendanaan untuk mendukung pembangunan air minum dan sanitasi
- 6) Masih rendahnya peran serta swasta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan air minum dan sanitasi
- 7) Belum terbatasnya pendataan dan teknologi informasi yang memadai

## **5. Bidang Urusan Penataan ruang**

### **a. Kesenjangan Wilayah**

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah pada masing-masing daerah berbeda, bergantung pada potensi sumber daya yang ada, masih terpusatnya pembangunan pada suatu daerah, minimnya aksesibilitas infrastruktur regional wilayah terpencil yang berdampak pada disparitas wilayah, dan pengelola kawasan perbatasan kabupaten/kota yang masih belum optimal sehingga menciptakan ketidakmerataan pendapatan masyarakat, yang menjadi salah satu indikasi adanya kesenjangan wilayah.

### **b. Perencanaan Tata Ruang**

Dengan telah ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah, maka kewajiban Pemerintah Daerah selanjutnya adalah menyusun Rencana Rinci Tata Ruang, yaitu Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dan Rencana Detil Tata Ruang. Dalam proses penyusunan kedua produk Rencana Tata Ruang, Pemerintah Daerah mengalami kesulitan dalam penyusunannya, berupa belum adanya pedoman penyusunan Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota dan penyediaan peta sesuai dengan skala yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana Rinci Tata Ruang. Selain itu juga belum adanya petunjuk teknis tentang peninjauan kembali RTRW terkait dengan banyaknya Kabupaten/Kota yang memasuki fase peninjauan kembali setiap 5 tahun. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan kewenangan dalam pemberian Persetujuan Substansi untuk Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota, dalam proses penerbitan Persetujuan Substansi, ditemui permasalahan terkait lambannya proses penerbitan Persetujuan Substansi RDTR, yaitu kesulitan dalam hal Rekomendasi Peta.

### **c. Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**



Semakin pesatnya perkembangan pembangunan perkotaan, sehingga menyebabkan penyediaan ruang publik kurang menjadi fokus pemerintah daerah, yang dibuktikan dengan belum terpenuhinya pemenuhan RTH sebesar 30 %, selain itu belum adanya sinkronisasi antara kebijakan sektoral dengan kebijakan spasial yang menyebabkan banyak alih fungsi lahan, hal ini terlihat dengan belum ditetapkannya lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sehingga dibutuhkan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang sampai saat ini masih minim instrumen tersebut di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini juga didukung dengan kurangnya aparatur penyidik (PPNS) bidang penataan ruang yang melakukan fungsi pengawasan, pengendalian, dan penindakan terhadap penyelenggaraan penataan ruang.

## **6. Bidang Urusan Perumahan**

- 1) Kebutuhan rumah meningkat pesat, namun penyediaan tidak seimbang dengan permintaan (backlog).
- 2) Penyediaan rumah belum mencapai sasaran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- 3) Desentralisasi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan
- 4) Kemampuan daya dukung lahan perkotaan menurun karena terbatasnya sarana dan prasarana perkotaan
- 5) Terbatasnya lahan di perkotaan dan sulitnya memperoleh tanah dengan harga murah serta belum adanya mekanisme baru dalam pengendalian harga tanah
- 6) Masih kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas di bidang perumahan dan permukiman
- 7) Belum adanya mobilisasi dana dan daya dunia usaha oleh masyarakat secara maksimal

## **7. Bidang Urusan Perhubungan**

- 1). Lambatnya pembangunan sektor kereta api multimoda

Untuk meningkatkan daya saing distribusi logistik dibutuhkan integrasi antara Moda Kereta Api yang mempunyai efisiensi pemakaian BBM yang tinggi serta kapasitas daya angkut yang tinggi dengan Kapal Kontainer yang mampu melintasi samudera dengan kapasitas angkut yang tinggi

- 2). Kurangnya fasilitas keselamatan transportasi jalan, kereta api, angkutan perintis kepulauan dan bandara yang sudah beroperasi

#### **8. Bidang Urusan Kepemudaan dan olah raga**

- 1) Minimnya pelatihan yang memicu kreatifitas dan inovasi pemuda, Belum terciptanya organisasi/kelompok pemuda yang kreatif dan mandiri, Belum optimalnya peran Pendidikan Nonformal dan Informal, Rendahnya daya saing tenaga kerja pemuda di pasaran dan dunia kerja, Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya pemuda
- 2) Pembentukan karakter dan kepribadian pemuda masih kurang optimal, Terbatasnya kegiatan yang terkait dengan kepemudaan, Masih banyak pengguna/pengedar narkoba dan miras yang belum terdeteksi, Masih Tingginya kasus Kenakalan remaja
- 3) Minimnya sarana prasarana olahraga, Minimnya jumlah pelatih yang profesional dan berlisensi, Belum adanya keterpaduan serta minimnya komunikasi dari masing-masing klub olah raga, Kurangnya penghargaan dan perhatian kepada atlit yang berprestasi

#### **9. Bidang Urusan Penanaman Modal**

- 1) Gejolak perekonomian Global mengancam capital out flow dari Jawa Timur (terindikasi kinerja investasi Jawa Timur di tahun 2014 hanya 91% apabila dibanding dengan kinerja 2013)
- 2) Pemerataan investasi yang kurang merata terindikasi dari naiknya disparitas antar wilayah dari indicator Gini Ratio di tahun 2014 menjadi 0,40 (tahun 2013 : 0,37)
- 3) Belum optimalnya promosi investasi,
- 4) Belum optimalnya sistim jaringan informasi investasi kabupaten / kota se Jawa Timur,
- 5) Masih lambatnya realisasi investasi (lag investasi)

#### **10. Bidang Urusan Koperasi dan UMKM**

- 1) Masih rendahnya daya saing produk UMKM. (Existing : Kepemilikan sertifikat standarisasi produk UMKM 2014 = 360 UKM. Longterm (2015-2019) 1.800 UKM.
- 2) Terbatasnya kemampuan dan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM. (Existing : dari 8.506 kopwan telah 7.000 Kopwan berprestasi diperkuat permodalannya, 1.521 Koppontren telah terfasilitasi 850

koppontren, dan dari 1.274 Kopkar telah terfasilitasi 115 Kopkar, 4.000 kelp fungsional dan mikro lainnya).

- 3) Belum optimalnya kelembagaan koperasi (dari 30.866 koperasi 3.710 (12,01%) tidak aktif) tahun lalu 13,07%.
- 4) Terbatasnya peran KUD dalam pengadaan pangan. (Dari 702 KUD, yang aktif 65%, yang berperan dalam distributor pupuk hanya 14 KUD atau 1,9%)

#### **11. Bidang Urusan Ketenagakerjaan**

- 1) Pertumbuhan angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan Pertambahan lapangan Kerja
- 2) Rendahnya kualitas dan ketrampilan Tenaga Kerja
- 3) Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan terhadap ketersediaan lapangan kerja
- 4) Miss Match aturan industrial perusahaan dengan kompetensi angkatan kerja
- 5) Masih rendahnya kemampuan dan Ketrampilan pencari kerja sehingga tidak mampu bersaing di bursa lokal, Nasional maupun Internasional
- 6) Kurangnya informasi pasar kerja dan rendahnya efektifitas bursa kerja karena lemahnya pendataan serta terbatasnya jaringan pelayanan bursa kerja
- 7) SDM angkatan kerja yang masih rendah, angkatan kerja mayoritas berpendidikan SD
- 8) fungsi kelembagan industrial belum optimal
- 9) tidak semua perusahaan mengikutkan karyawannya menjadi peserta BPJS.

#### **12. Bidang Urusan Ketahanan Pangan**

Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan beras (88,6 Kg/kapita/tahun), pola konsumsi masyarakat belum berimbang (skor PPH 79), fluktuasi harga bahan pangan, masih adanya daerah / desa rawan pangan, dan masih adanya bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

#### **13. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**

- 1) Rendahnya keterlibatan perempuan dalam Proses pengambilan keputusan dan/atau politik di Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif; Masih kurangnya pelatihan keterampilan, motivasi dan peralatan bagi embrio kelompok usaha ekonomi produktif perempuan, Belum semua

masyarakat dan perempuan produktif terjangkau program peningkatan ketrampilan

- 2) Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, Implementasi Peraturan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak belum Maksimal, Masih rendahnya perlindungan perempuan dan anak di segala sektor pembangunan, Belum optimalnya layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- 3) Belum optimalnya kelembagaan Pokja PUG dan PUHA (gugus tugas dan forum anak), Belum optimalnya penyusunan PPRG, belum semua SKPD menyusun data pilah sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan dan pembangunan,
- 4) Pengembangan dan pemberdayaan institusi masyarakat dalam program KB belum optimal, Pola pikir tradisional yang di latarbelakangi oleh faktor keagamaan dan kultur budaya masyarakat berdampak kepada kurangnya pengetahuan tentang alat kontrasepsi, Rendahnya kesertaan ber-KB pria, Petugas KB sangat kurang, masih tingginya unmet need, Kurang maksimalnya konseling pada PUS yang belum ber-KB, Masih rendahnya keikutsertaan MKJP, Keluarga Pra-S dan KS I yang usia muda dengan anak lebih dari 2 masih mendapatkan kesempatan bantuan dan jaminan melahirkan dan pendidikan
- 5) Masih rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja, Tingginya Angka Pernikahan Usia Dini,

#### **14. Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

- 1) Terbatasnya pedoman perencanaan responsif bencana
- 2) Belum terbangunnya persepsi tentang pentingnya penyusunan perencanaan yang peduli bencana
- 3) Kurangnya daerah Kabupaten / Kota yang menganggap perlu PERDA Penanggulangan Bencana.
- 4) Belum optimalnya penyebaran informasi tentang perlunya pembentukan Desa Tangguh
- 5) Belum tersusunnya rencana penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota di daerah rawan bencana
- 6) Belum terlatihnya aparat masalah Manajemen Logistik yang berbasis aplikasi
- 7) Pemahaman masyarakat terhadap ancaman bencana masih kurang
- 8) sengketa berlatar belakang keyakinan, persaingan kelompok, masalah perburuan, gesekan menjelang dan pasca PILKADA, menipisnya

toleransi, sengketa pertanahan, pendirian tempat ibadah dilokasi mayoritas agama lain

- 9) menurunnya pemahaman masyarakat mengenai wawasan kebangsaan. semakin menurunnya jiwa nasionalisme dan patriotisme, degradasi kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa,
- 10) peredaran Miras, video porno, meningkatnya pengguna narkoba, kriminalitas, kurang berfungsinya linmas, PHK, banyaknya pelanggaran keamanan dan ketertiban umum di masyarakat

#### **15. Bidang Urusan Pemerintahan Umum**

- 1) kualitas SDM aparatur, pola rekrutmen, penilaian perstasi, pola pembinaan karir, mindset aparatur, kualitas pelayan publik belum optimal, database pegawai, kelembagaan yang belum mendukung, kemampuan pengelolaan keuangan dan asset daerah.

#### **16. Bidang Urusan Sosial**

- 1) Masih besarnya jumlah PMKS utamanya 5 prioritas PMKS khususnya gelandangan, pengemis, gelandangan psykotik, anak jalanan dan WTS.
- 2) Rendahnya kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- 3) Belum semua PMKS bisa tertangani, sesuai yang diharapkan disebabkan masih kurangnya aksesibilitas PMKS terhadap Pelayanan Sosial dasar
- 4) Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum menjangkau seluruh kasus
- 5) Masih banyaknya jumlah korban pasung dan penderita psykotik yang tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial dan psykotik yang dipasung
- 6) Belum adanya pembagian tugas yang jelas untuk pelayanan mayat terlantar, gelandangan psykotik dan psykotik korban pasung dan penyandang HIV/AIDS
- 7) Terbatasnya daya tampung, kapasitas, serta permakanaan bagi klien di UPT Dinas Sosial, termasuk kondisi fisik Sarana dan Prasarana.
- 8) Tingkat kemiskinan di Jawa Timur tiap tahun mengalami penurunan namun cenderung mengalami perlambatan, masih Tingginya tingkat kemiskinan di beberapa daerah di Jawa Timur terutama di Madura dan beberapa daerah di Tapal kuda
- 9) Belum adanya sinkronisasi dan integrasi antara berbagai program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
- 10) Lemahnya koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan antar SKPD.

- 11) Banyaknya rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan.
- 12) Kurangnya sosialisasi Program perlindungan sosial yang meliputi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS).
- 13) Belum adanya pedoman umum atau petunjuk pelaksanaan dari berbagai program perlindungan sosial (KIP, KIS dan KSKS)
- 14) Masih Banyak Masyarakat Jawa Timur yang belum mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
- 15) Masih Banyak Masyarakat yang tidak terkover BPJS Kesehatan (sebagai Penerima PBI) seperti Balita Gizi Buruk, balita dari keluarga miskin, Pasung, PMKS.
- 16) Belum ada data yang valid terutama anak-anak yang tidak memiliki keluarga di Panti
- 17) Lemahnya koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan antar SKPD.
- 18) Masih Banyaknya rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan (KRTP)
- 19) Kondisi sumber daya alam yang berbeda-beda antara satu kab/kota satu dengan lainnya.
- 20) Keterbatasan anggaran dalam penanggulangan kemiskinan.
- 21) Kenaikan harga BBM menyebabkan masyarakat dalam kategori tingkat kesejahteraan Desil 2 dan 3 (Hampir Miskin) menjadi miskin
- 22) Masyarakat dengan kategori hampir miskin lebih mudah jatuh miskin ketika terjadi hal-hal yang tidak terduga seperti Sakit, PHK, bencana dan lain-lain.

#### **17. Bidang Urusan Kebudayaan**

- 1) Sangat terbatasnya cakupan sasaran pembinaan dan pemberdayaan terhadap kelompok seni dan organisasi seni untuk mendorong kemandirian dan profesionalisme seniman dan lembaga seni, belum tergali dan terkelola secara optimal Peninggalan sejarah, seni dan budaya lokal/daerah, Belum adanya upaya dari kelompok, lembaga masyarakat maupun pemerintah untuk melindungi warisan seni/budaya bangsa/daerah,
- 2) Kurangnya minat generasi muda terhadap kesenian dan budaya daerah karena pengaruh budaya asing, dan lunturnya kearifan lokal, Masih terbatasnya SDM profesional dalam pengembangan kebudayaan.

#### **18. Bidang Urusan Arsip**



- 1) Rendahnya kualitas SDM tenaga Fungsional Arsiparis, masih kurangnya kesadaran/tertib SKPD terhadap pentingnya pengelolaan arsip/dokumen
- 2) Minimnya sarana & prasaranan pendukung Arsip, belum tersedianya tanah untuk bangunan depo arsip daerah
- 3) Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan arsip belum optimal, belum tersedianya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

#### **19. Bidang Urusan Perpustakaan**

- 1) Masih rendahnya budaya minat baca dan berkunjung ke perpustakaan
- 2) Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia belum memadai, serta masih kurangnya tenaga pustakawan yang profesional;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, kualitas pelayanan serta belum maksimalnya sarana dan prasarana Perpustakaan

#### **20. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan**

- 1) Kualitas dan kuantitas benih dan induk masih rendah, utamanya yang bernilai ekonomis tinggi;
- 2) Harga pakan pabrikan tinggi;
- 3) Masih ada sarana dan prasarana pelabuhan yang belum dapat dioperasikan secara optimal karena belum sempurna;
- 4) Terbatasnya ketersediaan bahan baku
- 5) Mutu hasil tangkapan masih rendah
- 6) Penanganan mutu komoditas ekspor dengan Cold Chain System (CCS) belum optimal;
- 7) Produktivitas Garam masih rendah
- 8) BBM bersubsidi belum lancar distribusinya
- 9) SDI Menurun, utamanya di PANTURA Jawa Timur
- 10) Tingginya tingkat abrasi pantai
- 11) Masih sering terjadi pengrusakan wilayah pesisir dan sumber daya ikan oleh masyarakat;
- 12) Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
- 13) Masih belum optimalnya daya saing produk hasil perikanan dan kelautan
- 14) Masih maraknya kegiatan IUU Fishing
- 15) Degradasi lingkungan wilayah pesisir

#### **21. Bidang Urusan Pertanian**

- 1) Kepemilikan lahan pertanian relatif sempit (0,36 Ha), sebanyak 76,16% pengguna lahan adalah petani gurem (<0,50 ha)
- 2) Rendahnya bahan organik tanah, masih terjadinya alih fungsi lahan,
- 3) Fluktuasi Perubahan iklim yang mengakibatkan gangguan produksi,

- 4) Belum optimalnya infrastruktur pertanian,
- 5) Masih terjadi kehilangan hasil pertanian
- 6) Daya saing produk pertanian relatif masih rendah.
- 7) Terbatasnya Petugas Lapangan Pertanian,
- 8) Kelembagaan petani yang masih berdasarkan alamat (by address).
- 9) Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
- 10) Belum optimalnya Perlindungan usahatani (asuransi pertanian baru tahap pilot project)..
- 11) Produktivitas dan mutu yang masih rendah
- 12) Makin terbatasnya lahan subur, sementara lahan subur lebih diprioritaskan untuk pangan (beras
- 13) Rendahnya bahan organik tanah
- 14) Masih terbatasnya sarana prasarana perkebunan
- 15) Masih tingginya serangan hama penyakit dan gangguan usaha komoditi perkebunan
- 16) Rendahnya kemampuan kelembagaan petani dalam akses teknologi, informasi pasar, permodalan dan kemitraan
- 17) Produksi susu belum mencapai target peningkatan produksi
- 18) Peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan belum mencapai target jumlah kelahiran.
- 19) Pengembangan sistem budidaya ternak sapi secara koloni masih belum dianut sebagian besar kelompok
- 20) Kekurangan luas HMT sebesar 90,7% dari kebutuhan
- 21) Masih tingginya pemotongan ternak ruminansia betina produktif
- 22) Kondisi Rumah Potong Hewan (RPH) masih banyak yang belum memenuhi standar
- 23) Ketersediaan pusat pelayanan kesehatan hewan (puskeswan) masih minim
- 24) Ketersediaan pos pengawasan lalu lintas ternak (check point) belum mencapai sejumlah titik keluar masuk Provinsi
- 25) Situasi kesehatan hewan masih dihadapkan pada kondisi tingginya angka kematian ternak disebabkan penyakit hewan menular
- 26) Ketersediaan bibit ternak yang memenuhi standar masih belum memadai
- 27) Kelas kelompok tani subbidang usaha peternakan sebagian besar masih tingkat pemula

- 28) Aksesibilitas pinjaman dari lembaga keuangan perbankan terhambat karena dianggap usaha peternakan di tingkat kelompok tidak layak.
- 29) Masih banyak pengelola hutan rakyat yang belum mengerti sertifikasi ecolabeling s/d tahun 2014 sudah 31 FMU
- 30) Nilai tambah/jual hutan yang tersertifikasi masih belum dirasakan oleh masyarakat
- 31) Keterbatasan jumlah penyuluh kehutanan dalam memberikan penyuluhan tentang perkembangan kehutanan (425 orang) dan sebagian besar usia hampir pension
- 32) Masih susahnya peluang memasarkan produk hasil hutan masyarakat sekitar hutan yang daerahnya marjinal

## **22. Bidang Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral**

- 1) Ketergantungan akan bahan bakar fosil mengakibatkan menipisnya pasokan energi dan perlunya pengembangan Energi Baru dan Terbarukan seperti biogas, air, panas bumi, serta bahan bakar nabati.
- 2) Keterbatasan suplai energy dari jaringan listrik PLN, mengakibatkan beberapa desa/dusun di daerah pedesaan, terpencil dan kepulauan di Jawa Timur belum berlistrik. Hal ini disebabkan karena beberapa wilayah permukiman tersebut jauh dari jangkauan infrastruktur/jaringan PLN dan jumlah calon pelanggan tidak signifikan atau terlampaui sedikit.
- 3) Rasio Elektrifikasi rumah tangga di Jawa Timur Tahun 2012-2014, masing-masing adalah sebesar 75,16%; 79,59% dan sampai dengan akhir Bulan Oktober 2014 sebesar 82,77% atau sebanyak 8.887.744 dari 10.737.880 rumah tangga.
- 4) Rasio Elektrifikasi desa di Jawa Timur sebesar 99,62% atau sebanyak 8.841 dari 8.513 desa. Adapun desa belum berlistrik adalah sebesar 0,32% atau sebanyak 32 desa, tersebar di Kabupaten Bangkalan sebanyak 1 desa, Kabupaten Bondowoso sebanyak 4 desa, dan Kabupaten Sumenep sebanyak 27 desa.
- 5) Terdapat kegiatan pertambangan yang belum berijin dan tidak sesuai dengan ketentuan teknik/tata cara penambangan yang tepat, yang dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan lingkungan.
- 6) Berdasarkan karakteristik geologi, geografi dan morfologi wilayah, terdapat wilayah-wilayah tertentu di Jawa Timur yang merupakan cekungan air tanah, namun di lain juga terdapat daerah yang sulit air karena kurang memiliki potensi air tanah. Namun sampai dengan saat ini masih terdapat kegiatan pengambilan air tanah yang belum berijin dan

indikasi meningkatnya intensitas pengambilan air tanah, yang dikhawatirkan meningkatkan intrusi air laut.

### **23. Bidang Urusan Industri**

- 1) Meski telah mengalami penurunan, namun kandungan impor bahan baku/penolong masih relative tinggi (tahun 2012 : 86,34%, 2013 : 83,36 % dan di tahun 2014 : 82,45 %
- 2) Menghadapi MEA 2016, daya saing industry jatim menurun (Selama 2007-2013 Jatim kehilangan keunggulan kompetitif di ASEAN pada hampir 100 produk (menurun dari US\$ 835 juta menjadi US\$ 73 Juta))
- 3) Kurangnya keterkaitan Struktur Industri, antara Industri Hulu, Antara dan Hilir, yang terindikasi dari kecilnya (23,63%) komoditas unggulan daerah dengan daya penyebaran dan daya kepekaan tinggi.
- 4) Relatif lemahnya daya saing IKM & Industri Kreatif sebagai akibat perubahan standarisasi di Negara tujuan ekspor dan masih relative sedikitnya IKM yang telah terstandarisasi (tahun 2014 baru 7,34 %)
- 5) Pembatasan pengembangan industry mamin adiktif yang mengakibatkan kontraksi pertumbuhan IKM hingga -15 %,

### **24. Bidang Urusan Perdagangan**

- 1) Kurang lancarnya konektivitas/logistik ekspor-impor (dweeling time di pelabuhan antara 7 – 4 hari)
- 2) Kinerja net ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi hingga mencapai Rp. 6,84 Trilyun, sebagai akibat krisis finansial global di Uni Eropa dan Amerika;
- 3) Belum optimalnya pemakaian system Resi Gudang; terkendala jumlah minimal yang dapat disimpan di gudang (20 ton GKG berdasar perhitungan Bappebti yang sulit dipenuhi petani individu)
- 4) Kurang memadainya infrastruktur rantai pasok perdagangan regional;
- 5) Fluktuasi harga komoditas bahan makanan pokok yang cenderung ekstrem pada hari besar keagamaan tertentu;
- 6) Inefisiensi konektivitas perdagangan antar pulau dan asimetri informasi pada wilayah mitra dagang antar provinsi belum mampu maksimal diatasi 26 Kantor Perwakilan Dagang Jatim di Provinsi Mitra.

### **25. Bidang Urusan Pariwisata**

- 1) Belum adanya gedung untuk pelatihan peningkatan ekonomi kreatif di candrawilwatikta, serta belum optimalnya pemasaran produk yang dihasilkan

- 2) Belum optimalnya Even wisata maupaun festival seni budaya unggulan yang bisa dilaksanakan secara kontinyu dan bisa menarik wisatawan asing dan domestik, Belum terjalin dengan baik hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan biro-biro perjalanan wisata, Pengelolaan pariwisata yang ada belum optimal, Belum terintegrasikannya berbagai program untuk mencapai layanan sektor kepariwisataan.
- 3) Fasilitas Umum Pariwisata yang masih minim, Masih adanya sengketa lahan objek wisata yang akan dibangun dan dikelola pemerintah, Belum terpetakannya penataan tempat Pariwisata yang strategis

## **2.4 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH**

### **2.4.1 Isu strategis Jawa Timur terkait infrastruktur terdiri dari:**

1. peningkatan kapasitas dan penambahan jalan baru berdasar kebutuhan yang ada,
2. peningkatan percepatan pembangunan JLS,
3. penguatan konektivitas infrastruktur antar wilayah.
4. Pengendalian Banjir,
5. Penanggulangan Kekeringan,
6. Mendukung Kedaulatan Pangan,
7. Mendukung Kedaulatan Pangan,
8. Mendukung Kedaulatan Pangan dan Penanggulangan Kekeringan
9. Percepatan dalam rangka mendukung pencapaian target Universal Access pada tahun 2019,
10. Terpenuhinya penyediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
11. peningkatan pelayanan, sarana prasarana angkutan umum;
12. penyediaan angkutan multimoda yang terintegrasi;
13. peningkatan daya saing biaya distribusi logistik;
14. peningkatan sarana dan prasarana angkutan perintis;
15. peningkatan fasilitas keselamatan transportasi
16. memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat,
17. mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
18. memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional;

### **2.4.2 Isu strategis Jawa Timur terkait ekonomi terdiri dari:**

1. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, sempitnya luas pemilikan lahan pertanian (rata-rata 0,3 ha);
2. Target Pencapaian produksi tanaman pangan strategis di Jawa Timur tahun 2015 yaitu produksi padi sebesar 12,86 juta ton GKG

3. Kelembagaan petani yang masih lemah, yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani;
4. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) dan infrastruktur JIUT JIDES dan JUT;
5. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian.
6. Kualitas hasil produk pertanian (segar dan olahan) belum memenuhi permintaan pasar
7. Populasi sapi potong di Jawa Timur masih mendominasi nasional, namun berdasarkan sensus pertanian 2013 terjadi koreksi populasi, sehingga menunjukkan penurunan kontribusi. Untuk mencapai target populasi sapi potong di Jawa Timur guna mendukung populasi nasional, maka perlu meningkatkan persentase pertumbuhan dari semula 6,18% per tahun menjadi 6,26%.
8. Masih kurangnya penyediaan daging yang ASUH yang dihasilkan oleh Provinsi Jawa Timur, sehingga perlu dikembangkan Rumah Potong Hewan/ Rumah Potong Unggas yang memenuhi standar
9. Menghadapi era perdagangan bebas masih banyak produk hewan lokal yang belum terstandarisasi sehingga kurang mempunyai daya saing. Untuk menumbuhkan daya saing perlu dilakukan peningkatan kapasitas peternak serta mendorong sertifikasi proses dan produk peternakan
10. Terbatasnya sarana prasarana Infrastruktur pelabuhan.
11. Terbatas Sarana Prasarana Tangkap yang dimiliki oleh Nelayan.
12. Tingginya harga pakan pabrikan yang menyebabkan biaya operasional budidaya cukup besar.
13. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas garam rakyat sehingga belum dapat memenuhi standar industri.
14. Terbatasnya akses permodalan bagi usaha bidang kelautan dan perikanan.
15. Fasilitasi sertifikasi ekolabeling hutan hak/ hutan rakyat
16. Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan Tahura
17. Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dlm pengelolaan Tahura R Soerjo
18. Ketergantungan bahan pangan pokok beras
19. Pola konsumsi pangan belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman
20. Kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan masih rendah
21. Harga bahan pangan masih fluktuatif
22. Penyelenggaraan penyuluhan belum efektif

#### 2.4.3 Isu strategis Jawa Timur terkait Pemerintahan dan Kemasyarakatan terdiri dari:

1. Rendahnya budaya minat baca
2. Rendahnya kuantitas dan kualitas SDM Pustakawan
3. Sarana prasarana kurang memadai
4. Kurangnya SDM Fungsional Arsiparis
5. Belum memadai sarana dan prasarana kearsipan
6. kurangnya Pemanfaatan teknologi pengelolaan arsip.



7. Rendahnya kreatifitas dan inovasi serta pengembangan jiwa wirausaha bagi pemuda
8. Rendahnya nilai patriotisme, nasionalisme dan idealisme di kalangan pemuda dan organisasi pemuda
9. Prestasi Atlit yang cenderung menurun pada tingkat nasional
10. Masih Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan
11. Masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
12. Belum optimalnya Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan PUHA
13. Masih rendahnya Cakupan KB Aktif
14. Tingginya angka pernikahan usia dini
15. Kesenjangan Angka Partisipasi Sekolah antara Pendidikan Dasar 9 tahun, Pendidikan Menengah Universal 12 tahun
16. Tingginya angka buta aksara
17. Rendahnya Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
18. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang pendidikan
19. Rendahnya Kualitas Lulusan SMK
20. Kurangnya dan kuantias kualitas tenaga pendidik yang profesional, berkualitas dan kompeten dalam bidang yang diajarkannya
21. Belum maksimalnya peran Pendidikan Non formal dan Informal sebagai pendidikan alternatif
22. Belum optimalnya layanan pendidikan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
23. Belum setaranya kualitas pelayanan pendidikan diniyah, madrasah dan pendidikan umum.
24. Belum maksimalnya peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan
25. Belum optimalnya Pendidikan keayah bundaan
26. Belum adanya penerapan implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
27. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya
28. Menurunnya animo /minat dan apresiasi masyarakat dan generasi muda terhadap seni/budaya tradisional daerah sebagai akibat derasnya arus globalisasi
29. Kurang optimalnya pengembangan ekonomi kreatif
30. Naik Turunnya kunjungan wisata nasional/daerah baik wisatawan asing maupun domestik
31. Belum memadainya sarana prasarana Pariwisata
32. Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi. Sesuai target MDGs Tahun 2015 AKI = 102/100.000 KH, dan AKB = 23/1000 KH. Capaian Jawa Timur AKI = 93,52/100.000 KH, AKB = 27,23/1000 KH (kondisi capaian 2013);
33. Belum optimalnya penanganan masalah Gizi kepada Ibu Hamil, Bayi dan Balita

34. Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) masyarakat miskin
35. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap Sarana Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
36. Masih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular dan bencana
37. Tingginya kasus HIV dan AIDS serta penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Jatim
38. Rasio Tenaga kesehatan strategis terhadap jumlah penduduk dan pembiayaan kesehatan yang masih rendah
39. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
40. Kurang seimbangnya antara perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun formal dengan pertumbuhan angkatan kerja
41. Penegakan Hukum/Regulasi ketenaga kerjaan belum dilaksanakan dengan optimal
42. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang kurang efektif
43. Masih dijumpai ketidakjelasan tanggungjawab dalam penanganan psikotik dan mayat terlantar
44. Kurang optimalnya pelayanan UPT dalam rangka memberikan pelayanan maksimal dalam penanganan PMKS
45. Masih tingginya angka penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan makin meningkatnya jumlah penderita HIV dan AIDS, serta semakin rentannya masyarakat menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
46. Masih lemahnya penanganan korban bencana alam dan sosial
47. Kurang terintegrasinya Isu - Isu Kebencanaan dalam Perencanaan Pembangunan
48. Belum optimalnya kesiapan masyarakat dan pemerintah daerah di wilayah rawan bencana dalam menghadapi terjadinya bencana
49. Terjadinya perlambatan dalam penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Timur, serta masih tingginya tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan
50. Masih Tingginya tingkat kemiskinan di beberapa daerah di Jawa Timur terutama di Madura dan beberapa daerah di Tapal kuda
51. Pelaksanaan program-program perlindungan sosial yang masih banyak menemui kendala dan membingungkan masyarakat
52. Masih besarnya potensi terjadinya konflik sosial di masyarakat
53. Pemahaman dan kesadaran wawasan kebangsaan dan nilai nilai luhur bangsa masyarakat yang belum optimal
54. Ancaman stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat oleh meningkatnya tindak kriminal dan pelanggaran aturan hukum dan aturan daerah
55. Kualitas Sumberdaya aparatur yang berintegritas dan kompeten, kapasitas kelembagaan serta pengelolaan keuangan dan asset daerah